

**ANALISIS PENGARUH INVESTASI, SDM, SDA,  
AGLOMERASI DAN TEKNOLOGI TERHADAP  
POSISI PEREKONOMIAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
MENURUT TIPOLOGI KLASSEN  
DI JAWA TENGAH  
TAHUN 2000**



**TESIS**

untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi  
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Sancoyo Hadi  
C4B000124

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
Januari 2003

TESIS  
ANALISIS PENGARUH INVESTASI, SDM, SDA,  
AGLOMERASI DAN TEKNOLOGI TERHADAP  
POSISI PEREKONOMIAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
MENURUT TIPOLOGI KLASSEN DI JAWA TENGAH  
TAHUN 2000

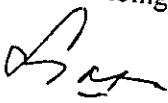
-disusun oleh-

Sancoyo Hadi  
C4B000124

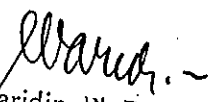
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 17 Januari 2003  
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

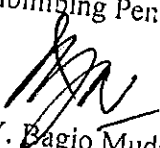
Pembimbing Utama

  
( Dr. Syafrudin Budiningharto )


Anggota Penguji

  
( Waridin, Ph.D )

Pembimbing Pendamping

  
( Drs. Y. Bagio Mudakir, MT )

  
( Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP )

  
( Hadi Sasana, SE, M.Si )

Semarang, 17 Januari 2003

Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan



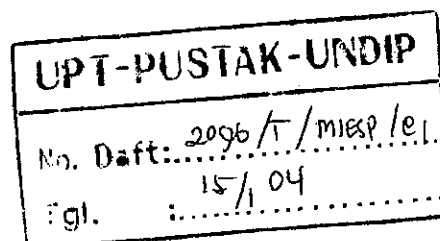


## *Pernyataan*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Januari 2003

( Sangoyo Hadi )



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

- Semakin ingin tahu, akan semakin banyak yang belum diketahui  
Untuk itu sebaiknya tahu bahwa belum tahu  
Dan ternyata yang kita ketahui belum seberapa dari pengetahuan Nya
- Dan Kami angkat keharuman namamu.
- Sesungguhnya dimana ada kesulitan di situ ada kelapangan.

(Al-Qur'an Surat Al-Insyirah 4 – 5)

Persembahan:

Kepada Yang Tercinta:

Istri : Bingar Dwi Handayani, SE. Akt.

Anak-anak: Adhitya Galang Sanjaya,  
Bella Santya Artina dan  
Cintya Amira Sania

## ABSTRACT

This research was done at Central Java Province, aims to analyze factors that influenced economic growth and economic position by Klassen Typology, and to analyze coefficient that factors.

Multiple regression with ordinary least square method has been employed to estimate the economic growth, and multinomial logistic for analyzing economic position, using secondary data (cross section) 2000 (N = 35).

The form of the model which estimated in general is :  $PE = \alpha_0 + \alpha_1 INV_i + \alpha_2 SDM_i + \alpha_3 SDA_i + \alpha_4 AG_i + \alpha_5 T + u_i$  for economic growth analyzing, and for analyzing economic position used dependent variable D4 with the same specification model.

The result show that factors which have significant influence to economic growth are investment, human resources, and natural resources. The significant factors that influence the economic position by Klassen Typology are human resources and natural resources.

The result imply that in scheme increasing to economic growth and economic position in regencies/cities, among other things : (1) to effort pulling the domestic and foreign investor, (2) maximize the potency of human resources and natural resources.

## ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan di Propinsi Jawa Tengah, bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan posisi perekonomian menurut Tipologi Klassen dan menganalisis besarnya pengaruh masing-masing faktor terhadap pertumbuhan ekonomi dan posisi perekonomian.

Untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)*, sedangkan untuk menganalisis posisi perekonomian menurut Tipologi Klassen menggunakan metode regresi logistik multinomial, dengan data cross section tahun 2000, jumlah observasi 35 ( $N = 35$ ).

Secara umum spesifikasi model yang diestimasi adalah :  $PE = \alpha_0 + \alpha_1 INV_i + \alpha_2 SDM_i + \alpha_3 SDA_i + \alpha_4 AG_i + \alpha_5 T + u_i$  untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk menganalisis posisi perekonomian digunakan dependen variabel D4 dengan spesifikasi model yang sama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi adalah investasi, sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap posisi perekonomian menurut Tipologi Klassen adalah sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA).

Hal tersebut memberikan implikasi bahwa dalam memacu pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah perlu dilakukan upaya-upaya, antara lain: (1) menarik investor domestik dan asing dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi di daerah, (2) pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunianya melalui usaha keras akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Analisis pengaruh investasi, SDM, SDA, aglomerasi dan teknologi terhadap posisi perekonomian daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2000.

Tesis ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana S-2 pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.

Keberhasilan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan tulus perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih khususnya kepada :

1. Dr. Syafrudin Budiningharto, Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang sekaligus sebagai pembimbing utama, yang telah banyak sekali memberikan bimbingan, koreksi, arahan serta masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian penulisan tesis ini.
2. Drs.Y.Bagio Mudakir, MT, Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang sekaligus sebagai pembimbing pendamping yang juga banyak memberikan dorongan,

bimbingan, koreksi, arahan dan masukan-masukan yang sangat membantu dalam rangka menyelesaikan tugas penyusunan tesis ini.

3. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang melalui diskusi-diskusi baik formal maupun non formal telah banyak memberikan masukan dan memperluas wawasan, serta Bagian Admisi yang telah berkontribusi membantu kelancaran studi penulis.
4. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan I Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan tesis.
5. Istriku tercinta serta anak-anakku yang dengan penuh pengertian telah rela kehilangan sebagian waktu dalam upaya penyelesaian tesis ini
6. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung membantu kelancaran penyusunan tesis.

Penulis menyadari berbagai keterbatasan yang penulis miliki, oleh karenanya tesis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian upaya ke arah penulisan yang sebaik-baiknya sesuai kaidah ilmiah yang berlaku telah penulis lakukan. Oleh karena itu kritik yang saran terhadap tesis ini sangat penulis harapkan sehingga di masa-masa mendatang dapat menulis lebih sempurna lagi.



Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, bagi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan bagi peneliti yang berminat dalam bidang ekonomi regional. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk mampu berbuat yang terbaik.

Semarang, Januari 2003

Sancoyo Hadi

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRACT .....	v
ABSTRAKSI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
 BAB I    PENDAHULUAN .....	 1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	12
1.3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian .....	13
 BAB II    TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIR- AN TEORITIS .....	 15
2.1. Tinjauan Pustaka .....	15
2.2. Studi Terdahulu .....	25
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis .....	30
2.4. Hipotesis .....	32
2.5. Definisi Operasional Variabel .....	33
 BAB III    METODE PENELITIAN .....	 35
3.1. Jenis dan Sumber Data.....	35
3.2. Metode Pengumpulan Data .....	35
3.3. Teknik Analisis .....	36
3.4. Prosedur Analisis dan Justifikasi Statistik .....	43
 BAB IV    GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN .....	 44
4.1. Letak Geografi .....	44
4.2. Penggunaan Lahan ... ..	44
4.3. Kependudukan .....	46
4.4. Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) dan Pendapatan Perkapita .....	48
4.5. Pertumbuhan Ekonomi .....	50
4.6. Posisi Perekonomian .....	51
4.7. Investasi .....	53
4.8. Sumber Daya Manusia .....	54
4.9. Sumber Daya Alam .....	58
4.10 Aglomerasi .....	61

4.11 Teknologi .....	63
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
5.1. Analisis Pertumbuhan Ekonomi .....	64
5.2. Analisis Posisi Perekonomian .....	74
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>83</b>
6.1. Kesimpulan .....	83
6.2. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1.	Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Atas Dasar Harga Konstan 1993) .....	2
Tabel 1.2.	Perbandingan Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri, Kab.Boyolali, Kab.Klaten dan Kab.Sragen Terhadap Kota Surakarta Tahun 1994 s/d 1999 (Atas dasar Harga Konstan 1993)..	4
Tabel 1.3.	Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah Tahun 1995 - 2000.....	7
Tabel 1.4.	Posisi Perekonomian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 1995 - 2000 Menurut Tipologi Klassen .....	9
Tabel 2.1.	Rincian Hipotesis Penelitian .....	33
Tabel 2.2.	Definisi Operasional Variabel .....	33
Tabel 4.1.	Luas Penggunaan Lahan Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2000 (ha).....	45
Tabel 4.2.	Penduduk dan Angkatan Kerja Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000 .....	47
Tabel 4.3.	Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) dan Pendapatan Perkapita Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000 .....	49
Tabel 4.4.	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000 .....	50
Tabel 4.5.	Posisi Perekonomian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2000 Menurut Tipologi Klassen .....	52
Tabel 4.6.	Nilai Investasi PMDN & PMA Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2000 .....	53
Tabel 4.7.	Indeks Pengembangan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2000.....	55
Tabel 4.8.	Indeks Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2000.....	57

Tabel 4.9.	Indeks Sumber Daya Alam Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2000.....	59
Tabel 4.10.	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2000 .....	60
Tabel 4.11.	Rasio Penduduk Perkotaan Terhadap Jumlah Populasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2000 .....	62
Tabel 5.1.	Ringkasan Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Dengan 9 Skenario .....	66
Tabel 5.2.	Ringkasan Estimasi Model Pertumbuhan Ekonomi SK#7	68
Tabel 5.3.	Matriks Koefisien Korelasi .....	69
Tabel 5.4.	Hasil Uji Normalitas Dengan Ramsey Reset Test .....	70
Tabel 5.5.	Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Uji Park .....	72
Tabel 5.6.	Ringkasan Hasil Estimasi Posisi Perekonomian dengan 9 Skenario .....	76
Tabel 5.7.	Klasifikasi Kemampuan Prediksi Variabel Bebas Terhadap Posisi Perekonomian .....	80
Tabel 5.8.	Hasil Estimasi Model Regresi Logistik Multinomial .....	80

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Sebaran Posisi Perekonomian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Menurut Tipologi Klassen Tahun 2000 .....	10
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis .....	32
Gambar 5.1. Hasil Uji Normalitas dengan J-B Test .....	69

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1      Data Untuk Analisis**
- Lampiran 2.    Print-out Estimasi Pertumbuhan Ekonomi**
- Lampiran 3.    Print-out estimasi Posisi Perekonomian**
- Lampiran 4.    Biodata Penulis**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang No.25 Tahun 2000 menyatakan bahwa salah satu misi yang menjadi sasaran pembangunan nasional adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberikan perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. Kenyataan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini antara lain adalah akibat kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan, telah menyebabkan kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antara perkotaan dan perdesaan, antar kawasan seperti kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, maupun antar golongan masyarakat sehingga gejolak sosial menjadi sangat mudah terjadi.

Menurut Mudrajat Kuncoro (2001), perbedaan laju pembangunan antardaerah menyebabkan terjadinya kesenjangan kemakmuran dan kemajuan antardaerah. Realitas tersebut dapat kita lihat pada Propinsi Jawa Tengah, di mana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita antar wilayah terjadi kesenjangan yang cukup mencolok sebagaimana tercermin dalam Tabel 1.1 sebagai berikut :



**Tabel 1.1.**  
**Perbandingan PDRB Perkapita, Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**  
**(Atas dasar Harga Konstan 1993)**

Kabupaten/Kota	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1 Kab.Cilacap	1,206,710.37	1,287,108.11	1,328,335.10	1,252,515.99	1,274,925.04	1,329,127.59
2 Kab.Banyumas	691,309.87	714,082.93	739,879.29	677,047.70	675,405.19	695,805.68
3 Kab.Purbalingga	743,763.19	787,005.48	794,788.63	721,851.45	721,823.46	734,230.62
4 Kab.Banjarnegara	997,964.95	1,057,029.35	1,052,993.41	991,277.04	992,736.24	1,010,039.54
5 Kab.Kebumen	761,041.19	808,126.28	823,719.58	712,753.83	731,053.84	800,861.83
6 Kab.Purworejo	858,607.88	913,751.77	983,639.37	864,100.44	880,869.87	897,887.12
7 Kab.Wonosobo	732,356.40	801,457.90	789,054.49	709,167.93	667,892.67	688,646.12
8 Kab.Magelang	919,433.36	967,609.53	971,551.43	933,727.08	937,959.25	963,004.68
9 Kab.Boyolali	994,611.98	1,052,612.94	1,067,101.68	960,984.31	966,914.01	969,235.14
10 Kab.Klaten	972,613.60	1,033,040.87	1,055,812.65	932,344.05	933,040.23	956,415.71
11 Kab.Sukoharjo	1,456,171.81	1,571,610.50	1,588,355.94	1,389,665.38	1,391,845.42	1,425,581.79
12 Kab.Wonogiri	660,935.56	704,847.38	718,228.34	680,153.29	689,027.70	708,888.39
13 Kab.Karanganyar	1,502,350.58	1,600,415.14	1,643,515.11	1,444,364.24	1,465,493.66	1,512,008.50
14 Kab.Sragen	764,394.35	817,209.31	831,699.86	752,912.89	764,569.99	782,783.48
15 Kab.Grobogan	612,738.62	624,869.57	603,361.77	539,651.80	517,310.98	568,309.08
16 Kab.Blora	640,696.74	662,896.23	848,919.27	803,788.80	805,201.11	820,474.19
17 Kab.Rembang	907,361.22	922,425.78	948,536.53	847,731.22	866,215.97	905,422.25
18 Kab.Pati	826,757.77	816,190.58	840,127.28	802,880.25	810,849.61	806,927.90
19 Kab.Kudus	4,983,539.92	5,285,822.53	5,149,842.53	4,502,034.79	4,480,339.88	4,521,193.33
20 Kab.Jepara	1,009,580.72	1,063,191.96	1,089,993.05	1,081,021.04	1,080,286.83	1,020,967.51
21 Kab.Demak	815,170.06	849,874.43	877,756.93	780,398.64	778,505.27	766,614.18
22 Kab.Semarang	1,296,507.03	1,490,572.90	1,538,408.57	1,257,730.85	1,270,863.92	1,325,120.29
23 Kab.Temanggung	1,014,998.46	1,131,096.69	1,142,982.77	1,015,836.02	1,032,253.61	1,037,831.78
24 Kab.Kendal	1,798,658.87	1,859,881.88	1,920,175.74	1,734,271.78	1,755,764.98	1,771,947.01
25 Kab.Batang	1,126,763.32	1,192,690.87	1,215,713.11	1,084,784.16	1,101,737.89	1,092,109.25
26 Kab.Pekalonga	1,067,433.30	1,149,435.48	1,180,396.41	1,068,952.98	1,093,558.13	1,093,198.78
27 Kab.Pemalang	814,402.91	854,534.45	880,968.33	827,583.59	837,996.65	863,324.09
28 Kab.Tegal	649,851.24	680,756.20	704,354.01	638,326.88	652,072.39	660,970.35
29 Kab.Brebes	708,844.10	750,106.82	787,674.70	803,100.14	835,947.82	841,558.41
30 Kota Magelang	2,430,637.27	2,646,019.51	2,735,570.90	2,552,314.51	2,655,376.41	2,752,649.15
31 Kota Surakarta	2,339,247.47	2,571,908.39	2,662,169.03	2,280,647.60	2,296,403.60	2,375,450.25
32 Kota Salatiga	1,527,137.80	1,634,170.20	1,699,033.77	1,672,164.01	1,697,066.42	1,756,790.55
33 Kota Semarang	3,849,998.01	4,241,092.75	4,612,844.87	3,742,071.99	3,824,156.71	3,959,928.09
34 Kota Pekalongan	1,611,296.93	1,728,624.09	1,786,719.21	1,640,795.05	1,701,973.25	1,663,323.28
35 Kota Tegal	1,345,090.39	1,444,138.64	1,496,932.96	1,404,448.15	1,457,333.25	1,519,539.11

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah

Dari Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa PDRB perkapita pada tahun 1999 yang tertinggi dicapai oleh Kabupaten Kudus yaitu sebesar Rp 4,48 juta sedangkan terendah di Kabupaten Grobogan sebesar Rp 519 ribu. Disamping itu PDRB perkapita (1995-2000) tertinggi selama 6 tahun terakhir pernah dicapai oleh Kabupaten Kudus yaitu sebesar lebih dari Rp 5,1 juta pada tahun 1996 dan 1997.

Sebagai contoh kesenjangan yang terjadi di Wilayah Pembangunan VIII di mana wilayah yang mempunyai jarak relatif sama dengan pusat pertumbuhan mempunyai pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

**Tabel 1.2.**  
**Perbandingan Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kab.Wonogiri, Kab.Boyolali,**  
**Kab.Klaten dan Kab.Sragen Terhadap Kota Surakarta Tahun 1994 s/d 1999**  
**(Atas Dasar Harga Konstan 1993)**

Tahun	Kota Surakarta			Kab. Wonogiri			Kab. Boyolali			Kab. Klaten			Kab. Sragen		
	Pendapatan Perkapita (Rp)	Pertum- buhan (%)		Pendapatan Perkapita (Rp)	Pertum- buhan (%)	Ratio thd Kota Surakarta (%)	Pendapatan Perkapita (Rp)	Pertum- buhan (%)	Ratio thd Kota Surakarta (%)	Pendapatan Perkapita (Rp)	Pertum- buhan (%)	Ratio thd Kota Surakarta (%)	Pendapatan Perkapita (Rp)	Pertum- buhan (%)	Ratio thd Kota Surakarta (%)
1993	2.349.486,92			633.965,38			586.065,80			863.829,72			702.109,80		
1994	2.005.970,11	(14,62)		619.689,82	(2,25)	30,89	938.400,48	60,12	46,78	913.951,90	5,80	45,56	717.207,62	2,15	35,75
1995	2.359.247,47	17,61		660.935,56	6,66	28,01	994.611,98	5,99	42,16	972.613,60	6,42	41,23	764.394,35	6,58	32,40
1996	2.571.908,39	9,01		704.847,38	6,64	27,41	1.052.612,94	5,83	40,93	1.033.040,87	6,21	40,17	817.209,31	6,91	31,77
1997	2.662.169,03	3,51		718.228,34	1,90	26,98	1.067.101,68	1,38	40,08	1.055.812,64	2,20	39,66	832.340,26	1,85	31,27
1998	2.280.889,78	(14,32)		880.153,29	22,55	38,59	960.995,30	(9,94)	42,13	932.358,05	(11,69)	40,88	748.439,08	(10,08)	32,81
1999	2.296.403,60	0,68		680.153,29	(22,72)	29,62	966.914,01	0,62	42,11	933.040,23	0,07	40,63	764.569,99	2,16	33,29

Sumber : BPS Prop.Jateng, 1994 - 2000

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa prosentase pendapatan perkapita wilayah yang mempunyai jarak yang relatif sama terhadap pusat pertumbuhan, yaitu : Wonogiri 31 Km, Boyolali 27 Km, Klaten 36 Km, Sragen 27 Km. Kab.Wonogiri sebagai wilayah yang mempunyai jarak yang relatif sama dengan 3 Kabupaten lainnya terhadap pusat pertumbuhan yaitu Kota Surakarta mempunyai pendapatan perkapita yang paling rendah, yaitu selama tahun 1994 s/d 1997 dibawah 30% sedangkan 3 kabupaten lainnya antara 30% sampai 47%. Fenomena lain yang menarik adalah pada tahun 1998 yaitu saat masa krisis ekonomi, Kota Surakarta mengalami pertumbuhan pendapatan perkapita minus 14,32%, Kab.Boyolali minus 9,94%, Kabupaten Klaten minus 11,69%, dan Kabupaten Sragen minus 10,08%, di Kabupaten Wonogiri justru mengalami pertumbuhan pendapatan perkapita yang fantastis, yaitu positif 22,55%. Dengan kata lain pada saat penduduk di wilayah lain mengalami penurunan tingkat kesejahteraan yang sangat tajam, masyarakat Kabupaten Wonogiri menikmati peningkatan tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi. Kondisi demikian juga terjadi di wilayah pembangunan lainnya di Propinsi Jawa Tengah. Kenyataan tersebut menunjukkan ketimpangan antar wilayah di Propinsi Jawa Tengah yang masih relatif tinggi.

Ketimpangan antar wilayah akan terlihat nyata apabila dilakukan identifikasi posisi perekonomian melalui Tipologi Klassen (Mudradjat Kuncoro, 1993) yang membagi daerah berdasarkan dua indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Dengan

menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu : daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Syafrizal, 1997, Mudradjat Kuncoro, 1993, Hill, 1989).

Adapun laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah tahun 1995 - 2000 seperti pada Tabel 1.3 sebagai berikut :

**Tabel 1.3.**  
**Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 1995 - 2000**

Kabupaten/Kota	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1 Kab.Cilacap	9.95	10.45	5.10	-5.21	2.19	5.25
2 Kab.Banyumas	8.21	4.63	3.61	-6.80	0.53	4.03
3 Kab.Purbalingga	6.11	7.02	2.20	-8.27	1.10	2.78
4 Kab.Banjarnegara	7.15	7.37	0.82	-4.15	0.17	2.65
5 Kab.Kebumen	5.51	6.23	2.75	-13.03	3.62	4.28
6 Kab.Purworejo	6.67	7.48	2.43	-6.49	2.48	2.41
7 Kab.Wonosobo	20.20	10.70	-0.57	-9.37	1.52	4.41
8 Kab.Magelang	5.43	6.53	1.17	-3.14	1.64	3.50
9 Kab.Boyolali	6.60	6.55	2.02	-9.51	1.18	0.86
10 Kab.Klaten	7.40	7.12	2.68	-11.35	0.49	3.98
11 Kab.Sukoharjo	19.45	9.50	2.78	-11.23	1.25	3.52
12 Kab.Wonogiri	7.35	7.76	2.70	-4.67	1.41	3.73
13 Kab.Karanganyar	7.02	7.97	3.77	-11.29	2.48	4.51
14 Kab.Sragen	7.19	7.54	2.30	-9.10	1.98	2.85
15 Kab.Grobogan	3.68	3.37	-2.43	-9.74	-2.78	11.15
16 Kab.Blora	5.50	3.41	2.99	-5.16	1.45	2.45
17 Kab.Rembang	5.31	4.03	4.17	-10.25	2.91	4.98
18 Kab.Pati	4.43	0.36	3.87	-4.02	2.87	0.36
19 Kab.Kudus	8.15	7.57	-0.37	-11.79	0.79	1.89
20 Kab.Jepara	7.69	7.31	4.31	0.03	0.65	4.61
21 Kab.Demak	8.12	7.58	4.96	-10.52	2.33	2.89
22 Kab.Semarang	8.95	15.98	3.76	-17.79	1.46	4.78
23 Kab.Temanggung	5.98	6.22	7.85	-10.57	2.25	3.47
24 Kab.Kendal	6.24	6.40	4.32	-9.30	2.17	2.17
25 Kab.Batang	6.79	7.02	3.02	-10.17	2.32	2.01
26 Kab.Pekalonga	6.93	6.84	3.88	-8.66	3.51	2.37
27 Kab.Pemalang	6.90	6.98	4.74	-1.63	1.59	3.71
28 Kab.Tegal	5.53	6.54	5.45	-9.02	2.53	4.89
29 Kab.Brebes	6.28	6.22	5.41	2.28	4.42	4.56
30 Kota Magelang	6.79	8.99	3.05	-7.29	3.87	3.59
31 Kota Surakarta	18.46	9.18	4.22	-13.93	1.44	4.15
32 Kota Salatiga	7.18	7.06	3.73	-1.51	1.79	3.57
33 Kota Semarang	11.29	12.77	9.73	-18.23	3.41	4.97
34 Kota Pekalongan	7.93	7.59	3.32	-8.13	3.96	3.99
35 Kota Tegal	7.67	8.28	3.59	-6.12	3.73	5.40

*Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah*

Apabila data pendapatan perkapita (Tabel 1.1) dan laju pertumbuhan PDRB (Tabel 1.3) diidentifikasi menurut Tipologi Klassen, dapat diketahui perubahan posisi perekonomian suatu daerah selama 6 tahun terakhir (1995 – 2000), misalnya pada tahun 1995 daerah yang

termasuk kategori cepat maju cepat tumbuh sebanyak 7 Kabupaten/Kota, maju tertekan 8 Kabupaten/Kota, berkembang cepat 3 Kabupaten/Kota dan daerah relatif tertinggal sebanyak 17 Kabupaten Kota. Sedangkan pada tahun 1996 daerah yang termasuk kategori cepat maju cepat tumbuh sebanyak 5 Kabupaten/Kota, maju tertekan 6 Kabupaten/Kota, berkembang cepat 3 Kabupaten/Kota dan daerah relatif tertinggal sebanyak 21 Kabupaten/Kota. Secara keseluruhan perubahan posisi perekonomian tahun 1995 – 2000 dapat dilihat pada Tabel 1.4.

**Tabel 1.4.**  
**Posisi Perekonomian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**  
**Tahun 1995 - 2000 Menurut Tipologi Klassen**

Kabupaten/Kota	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Keterangan
1 Kab.Cilacap	4	4	3	1	1	1	1 = cepat maju cepat tum- buh. 2 = maju tert- kan. 3 = berkem- bang cepat 4 = relatif ter- tinggal
2 Kab.Banyumas	3	4	3	3	4	3	
3 Kab.Purbalingga	4	3	4	4	4	4	
4 Kab.Banjarnegara	2	4	4	3	4	4	
5 Kab.Kebumen	4	4	4	4	3	3	1 = cepat maju cepat tum- buh. 2 = maju tert- kan. 3 = berkem- bang cepat 4 = relatif ter- tinggal
6 Kab.Purworejo	4	4	4	3	3	4	
7 Kab.Wonosobo	3	3	4	4	4	3	
8 Kab.Magelang	4	4	4	3	4	4	
9 Kab.Boyolali	2	4	4	4	4	4	1 = cepat maju cepat tum- buh. 2 = maju tert- kan. 3 = berkem- bang cepat 4 = relatif ter- tinggal
10 Kab.Klaten	2	4	4	4	4	3	
11 Kab.Sukoharjo	1	1	2	2	2	2	
12 Kab.Wonogiri	4	3	4	3	4	3	
13 Kab.Karanganyar	2	2	1	2	1	1	1 = cepat maju cepat tum- buh. 2 = maju tert- kan. 3 = berkem- bang cepat 4 = relatif ter- tinggal
14 Kab.Sragen	4	4	4	4	3	4	
15 Kab.Grobogan	4	4	4	4	4	3	
16 Kab.Blora	4	4	4	3	4	4	
17 Kab.Rembang	4	4	3	4	3	3	1 = cepat maju cepat tum- buh. 2 = maju tert- kan. 3 = berkem- bang cepat 4 = relatif ter- tinggal
18 Kab.Pati	4	4	3	3	3	4	
19 Kab.Kudus	2	2	4	2	2	2	
20 Kab.Jepara	3	4	3	3	4	3	
21 Kab.Demak	4	4	3	4	3	4	1 = cepat maju cepat tum- buh. 2 = maju tert- kan. 3 = berkem- bang cepat 4 = relatif ter- tinggal
22 Kab.Semarang	1	1	1	4	4	1	
23 Kab.Temanggung	4	4	3	4	3	4	
24 Kab.Kendal	2	2	1	2	1	2	
25 Kab.Batang	4	4	4	4	3	4	1 = cepat maju cepat tum- buh. 2 = maju tert- kan. 3 = berkem- bang cepat 4 = relatif ter- tinggal
26 Kab.Pekalongan	2	4	3	4	3	4	
27 Kab.Pemalang	4	4	3	3	4	4	
28 Kab.Tegal	4	4	3	4	3	3	
29 Kab.Brebes	4	4	3	3	3	3	1 = cepat maju cepat tum- buh. 2 = maju tert- kan. 3 = berkem- bang cepat 4 = relatif ter- tinggal
30 Kota Magelang	1	2	2	1	1	2	
31 Kota Surakarta	1	1	1	2	2	1	
32 Kota Salatiga	2	2	1	1	2	2	
33 Kota Semarang	1	1	1	2	1	1	1 = cepat maju cepat tum- buh. 2 = maju tert- kan. 3 = berkem- bang cepat 4 = relatif ter- tinggal
34 Kota Pekalongan	1	1	2	1	1	1	
35 Kota Tegal	1	2	1	1	1	1	

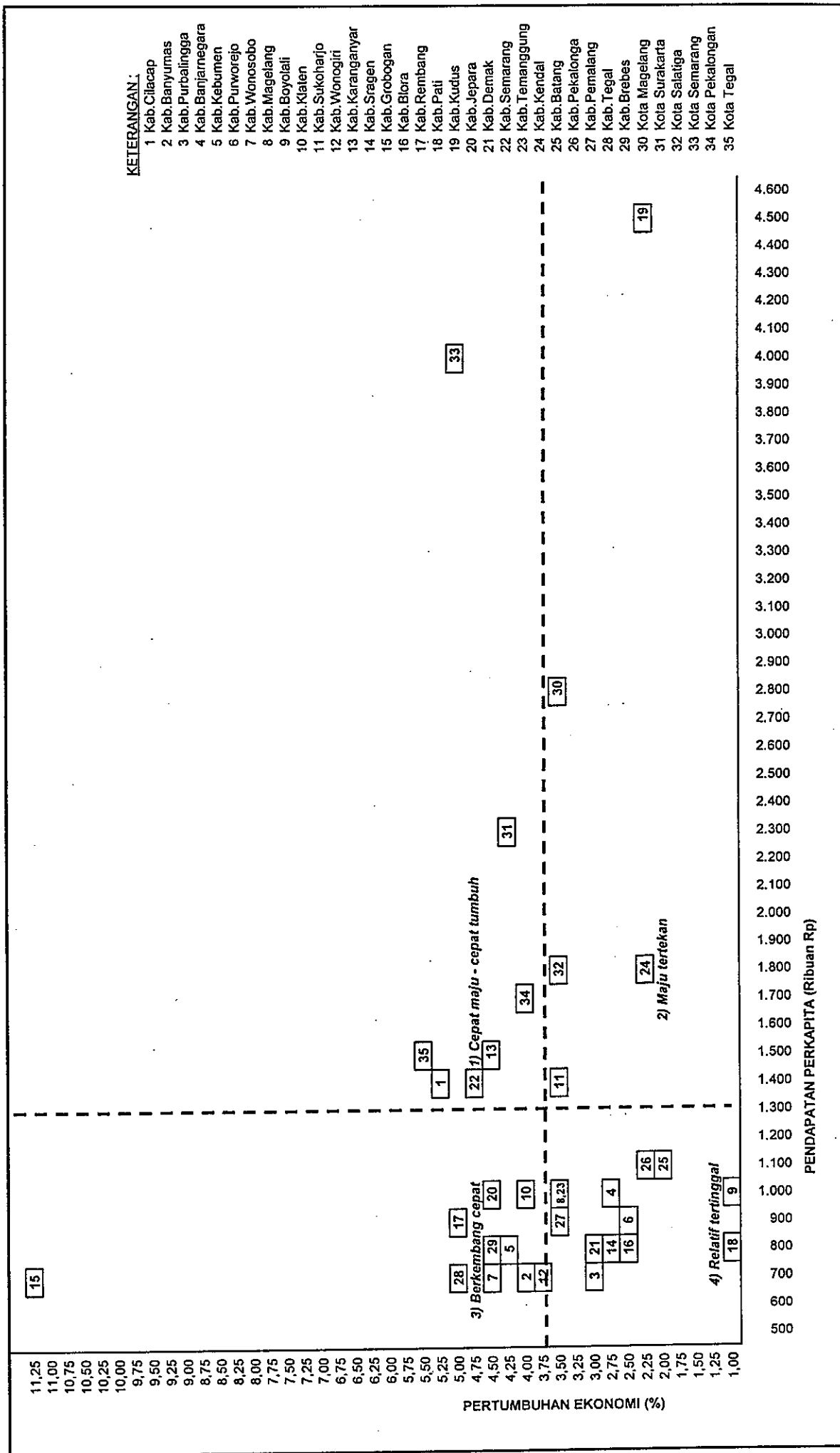
*Sumber : BPS Prop.Jateng, diolah*

Sebagai gambaran sebaran posisi perekonomian menurut tipologi

Klassen tahun 2000 sebagai berikut :



Gambar 1.1  
Sebaran Posisi Perekonomian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah  
Menurut Tipologi Klasen Tahun 2000



Dengan membandingkan posisi perekonomian selama 6 tahun (1995 – 2000) menurut Tipologi Klassen, ternyata beberapa Kabupaten/Kota secara relatif mengalami perubahan posisi. Namun demikian beberapa Kabupaten/Kota yang lain relatif tetap pada posisi relatif tertinggal atau sebaliknya. Posisi tersebut dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita.

Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah karena adanya potensi sumber daya yang tidak merata (Rudy Badrudin, 1997). Disamping itu pertumbuhan ekonomi regional dipengaruhi pula oleh ketidakmerataan dalam alokasi investasi (Rudy Badrudin, 1992:2). Menurut Giaratani dan Soeroso dalam Suahasil Nazara (1994), perbedaan pertumbuhan ekonomi regional disebabkan oleh faktor efisiensi regional yang dipengaruhi oleh keuntungan aglomerasi. Keuntungan aglomerasi adalah keuntungan yang diperoleh akibat berkumpulnya perusahaan pada tempat tertentu (Suahasil Nazara, 1994). Sedangkan menurut Budiono (1995), negara-negara yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang mantap dalam jangka waktu yang cukup lama dijumpai bahwa kemajuan teknologi merupakan sumber pertumbuhan output yang sangat penting. Dengan demikian posisi perekonomian suatu wilayah dipengaruhi oleh investasi, sumber daya manusia, sumber daya alam, aglomerasi dan teknologi.

Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini mengambil judul “Analisis pengaruh investasi, sumber daya manusia, sumber daya alam,

aglomerasi dan teknologi terhadap posisi perekonomian daerah Kabupaten/Kota menurut Tipologi Klassen di Jawa Tengah Tahun 2000”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Posisi perekonomian suatu wilayah menurut Tipologi Klassen dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Pertumbuhan ekonomi antar wilayah berbeda karena adanya potensi sumber daya yang tidak merata (Rudy Badrudin, 1997). Disamping itu dipengaruhi pula oleh ketidakmerataan dalam alokasi investasi (Rudy Badrudin, 1992:2). Menurut Giaratani dan Soeroso dalam Suahasil Nazara (1994), perbedaan pertumbuhan ekonomi regional disebabkan oleh faktor efisiensi regional yang dipengaruhi oleh keuntungan aglomerasi. Sedangkan menurut Budiono (1995), kemajuan teknologi merupakan sumber pertumbuhan output yang sangat penting. Jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah perbedaan pertumbuhan ekonomi dan posisi perekonomian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang mencerminkan tingkat kemajuan wilayah yang bersangkutan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh investasi, sumber daya manusia, sumber daya alam, aglomerasi dan teknologi masing-masing Kabupaten/Kota yang berbeda, sehingga ada beberapa pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini dengan rumusan sebagai berikut :

- 1) Apakah investasi, sumber daya manusia, sumber daya alam, aglomerasi dan teknologi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.
- 2) Apakah investasi, sumber daya manusia, sumber daya alam, aglomerasi dan teknologi berpengaruh terhadap posisi perekonomian suatu wilayah.
- 3) Seberapa besar pengaruh investasi, sumber daya manusia, sumber daya alam, aglomerasi dan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.
- 4) Seberapa besar pengaruh investasi, sumber daya manusia, sumber daya alam, aglomerasi dan teknologi terhadap posisi perekonomian suatu wilayah.

### **1.3. Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan posisi perekonomian suatu wilayah.
- 2) Untuk menganalisis besarnya pengaruh masing-masing faktor terhadap pertumbuhan ekonomi dan posisi perekonomian suatu wilayah.

#### **1.3.2. Manfaat**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1) Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan posisi perekonomian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

dapat dipakai sebagai informasi bagi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam perumusan kebijakan pembangunan.

- 2) Memberikan sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu ekonomi regional khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan posisi perekonomian suatu wilayah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1. Posisi Perekonomian**

Posisi perekonomian melalui Tipologi Klassen, ditetapkan dengan membagi daerah berdasarkan dua indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu : daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Syafrizal, 1997, Mudradjat Kuncoro, 1993, Hill, 1989). Jadi penetapannya berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita.

##### **2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi**

Secara singkat pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Budiono, 1995:1). Definisi tersebut terdiri dari 3 kata kunci, yaitu : proses, output perkapita dan jangka panjang dengan penjelasan sebagai berikut :

Pertama, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita lihat aspek dinamis dari

suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Kedua, pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan output perkapita. Disini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu output total (GDP) dan jumlah penduduk. Output perkapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output perkapita harus dianalisis dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak dan jumlah penduduk di lain pihak. Suatu teori pertumbuhan ekonomi yang lengkap haruslah dapat menjelaskan apa yang terjadi dengan GDP total dan apa yang terjadi dengan jumlah penduduk. Dengan kata lain teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP total dan teori mengenai pertumbuhan penduduk.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka panjang. Kenaikan output perkapita satu atau dua tahun yang kemudian diikuti dengan penurunan output perkapita bukan pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama (10, 20 atau 50 tahun, atau bahkan lebih lama lagi) mengalami kenaikan output perkapita. Tentu saja bisa terjadi bahwa pada suatu tahun output perkapita merosot (misalnya karena kegagalan panen). Tetapi apabila selama jangka waktu yang cukup lama tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk naik, maka kita katakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi. Beberapa ekonom berpendapat bahwa

adanya kecenderungan bagi output perkapita saja tidak cukup. Mereka memberikan persyaratan yang lebih ketat pada pengertian pertumbuhan ekonomi. Menurut mereka pertumbuhan ekonomi terjadi apabila kecenderungan output perkapita untuk naik yang bersumber dari proses intern perekonomian tersebut, menurut persyaratan ini harusnya berasal dari kekuatan yang berasal dari dalam perekonomian sendiri, bukan berasal dari luar yang bersifat sementara. Istilah proses pertumbuhan ekonomi harus bersifat self-generating, yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu sendiri menelorkan kekuatan atau momentum bagi timbulnya kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya.

Menurut Budiono (1995), hal penting dalam analisis pertumbuhan ekonomi regional terletak pada analisis mobilitas faktor-faktor produksi, dimana mobilitas antar region berlangsung secara terbuka, khususnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal. Hal ini merupakan masalah yang penting dalam perumusan kebijakan pembangunan regional, sehingga dalam penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam skala regional.

Teori pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan (Budiono, 1995).



Tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertambahan yang sebenarnya barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi sesuatu perekonomian (Sadono Sukirno, 1999). Dengan demikian untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai sesuatu negara perlu dihitung pendapatan nasional riil atau produk domestik bruto riil. Berdasarkan data produk domestik brutto riil, tingkat pertumbuhan ekonomi dalam secara langsung dihitung dengan rumus sebagai berikut (Sadono Sukirno, 1999) :

$$g = \frac{PN-riil_1 - PN-riil_0}{PN-riil_0} \times 100$$

di mana g adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen, PN-riil<sub>1</sub> adalah pendapatan nasional untuk tahun di mana kadar pertumbuhan ekonominya dihitung dan PN-riil<sub>0</sub> adalah pendapatan nasional tahun sebelumnya. Untuk skala regional digunakan data Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) riil.

### 2.1.3. Investasi

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. (Sadono Sukirno, 2000).

Secara statistik, investasi atau pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dibedakan menjadi 4 komponen, yaitu : (1) investasi perusahaan-perusahaan swasta, (2) pengeluaran untuk

mendirikan tempat tinggal, (3) perubahan dalam investaris (*inventory*), dan (4) investasi yang dilakukan oleh pemerintah. (Sadono Sukirno, 2000). Investasi perusahaan-perusahaan merupakan komponen yang terbesar dari investasi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu. Pengeluaran investasi perusahaan-perusahaan ini yang terutama diperhatikan oleh ahli-ahli ekonomi dalam membuat analisis mengenai investasi (sadono Sukirno, 2000). Berdasarkan pertimbangan ini, maka dalam penelitian ini investasi dilihat dari jumlah nilai investasi perusahaan-perusahaan baik perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan dalam 3 hal, yaitu : (1) pertumbuhan yang disebabkan oleh modal, (2) pertumbuhan yang disebabkan oleh tenaga kerja, dan (3) pertumbuhan yang disebabkan oleh perubahan dalam produktivitas (Suryaningrum, 2000). Dengan demikian investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Mengingat pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu faktor penentu dalam posisi perekonomian, maka secara tidak langsung investasi berpengaruh terhadap posisi perekonomian.

#### **2.1.4. Sumber Daya Manusia**

Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan pertambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi.

Studi yang dilakukan oleh Solow memasukkan faktor produksi modal dan tenaga kerja sebagai komponen penting bagi pertumbuhan

ekonomi. Model ini memungkinkan terjadinya substitusi antara peranan modal dan tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi, yang dirumuskan :  $Q = f(K, L)$  dimana  $K, L > 0$ ,  $Q$  = output bersih sesudah depresiasi,  $K$  = modal dan  $L$  = tenaga kerja. Dengan demikian tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi yang berarti pula merupakan faktor yang penting pula dalam menentukan posisi perekonomian.

Nugroho (2001), mengemukakan teori moderen yang lebih menekankan aspek kualitas dari faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, misalnya tenaga kerja atau sumber daya manusia lebih dilihat kualitasnya daripada kuantitasnya, yaitu dari tingkat pendidikan (diukur dengan proporsi tenaga kerja terdidik terhadap total tenaga kerja) dan tingkat kesehatannya yang diukur dengan angka harapan hidup. Cabang teori yang menekankan pada kualitas sumber daya manusia adalah teori Schumpeter yang menyatakan bahwa sumber daya manusia yang berani menanggung resiko serta berani melakukan inovasi. Sumber daya manusia ditinjau dari aspek kualitas dewasa ini telah tersedia data indeks mutu manusia atau dikenal sebagai *Human Development Index (HDI)* yang merupakan indeks gabungan dari tingkat harapan hidup, tingkat pendidikan dan standar hidup.

Disamping itu dapat pula dilihat dari Indeks SDM yang dipakai dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.104 tahun 2000, yaitu hasil perhitungan dari :

Angkatan Kerja Daerah / Populasi Daerah dibagi Jumlah Angkatan Kerja Seluruh Daerah / Jumlah Populasi Seluruh Daerah.

Ukuran sumber daya manusia yang lazim dipakai dalam data statistik adalah jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja / penduduk umur 14 – 64 tahun) yang bekerja.

Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini, maka sumber daya manusia dicoba dilihat melalui 3 aspek, yaitu :

- 1) Indeks Mutu Manusia / Human Development Index (HDI) adalah indeks gabungan yang didasarkan pada tingkat harapan hidup, tingkat pendidikan dan standar hidup.
- 2) Indeks SDM sebagaimana dimaksud dalam PP No.104 tahun 2000, yaitu hasil perhitungan dari : Angkatan Kerja Daerah / Populasi Daerah dibagi Jumlah Angkatan Kerja Seluruh Daerah / Jumlah Populasi Seluruh Daerah.
- 3) Angkatan kerja (usia kerja) yang bekerja.

#### **2.1.5. Sumber Daya Alam**

Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Di dalam setiap negara di mana pertumbuhan ekonomi baru bermula, terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di luar sektor primer (pertanian dan pertambangan), yaitu sektor di mana kekayaan alam terdapat. (Sadono Sukirno, 1999). Apabila negara tersebut mempunyai

kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, maka pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat (Sadono Sukirno, 1999).

Rudy Badrudin (1997) mengemukakan bahwa perbedaan tingkat pertumbuhan antar wilayah karena adanya potensi sumber daya yang tidak merata.

Dalam mengukur besaran sumber daya alam secara kuantitatif merujuk pada kriteria yang digunakan dalam perhitungan Dana Alokasi Umum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.104 tahun 2000, yaitu indeks SDA yang merupakan hasil perhitungan dari :  $\text{PDRB sektor SDA Daerah} / \text{PDRB Daerah}$  dibagi  $\text{Jumlah PDRB sektor SDA seluruh daerah} / \text{Jumlah PDRB seluruh Daerah}$ .

Sumber daya alam dapat pula dilihat dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengingat penerimaan PBB mencerminkan luas dan kualitas tanah yang merupakan potensi sumber daya alam. Disamping itu dapat dilihat dari besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh daerah yang bersangkutan, karena penentuan DAU antara lain didasarkan pada potensi sumber daya alam daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam penelitian ini sumber daya alam dilihat dari 3 aspek, yaitu :

- 1) Indeks SDA sebagaimana dimaksud dalam PP No.104 tahun 2000, yaitu hasil perhitungan dari :  $\text{PDRB Sektor SDA Daerah} / \text{PDRB Daerah}$  dibagi  $\text{Jumlah PDRB Sektor SDA Seluruh Daerah} / \text{Jumlah PDRB Seluruh Daerah}$ .

- 2) Jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah yang bersangkutan.
- 3) Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah ybs.

#### 2.1.6. Aglomerasi

Keuntungan-keuntungan pokok aglomerasi adalah efek skala atau indivisibilitas (Harry W. Richardson, 1991). Keuntungan-keuntungan aglomerasi yang bertalian dengan skala adalah keuntungan-keuntungan internal (*internal economies*), keuntungan yang bersifat eksternal atau disebut keuntungan lokalisasi (*localization economies*) (Harry W. Richardson, 1991). Kemanfaatan aglomerasi yang paling kuat adalah keuntungan yang bersifat eksternal bagi industri-industri individual. Karena keuntungan seperti itu kemungkinan adalah paling besar di pusat-pusat perkotaan, maka keuntungan tersebut sering kali dinamakan keuntungan-keuntungan urbanisasi (*urbanization economies*) atau keuntungan konsentrasi perkotaan (*economies of urban concentration*) (Hoover, 1948 dalam Harry W. Richardson, 1991).

Berkaitan dengan hal tersebut, Giaratani dan Soeroso (1995) dalam Suryaningrum (2000), untuk analisis ekonomi regional memasukkan faktor efisiensi regional dimana faktor efisiensi ini dipengaruhi secara langsung oleh keuntungan aglomerasi. Dalam studi ini keuntungan aglomerasi didefinisikan sebagai keuntungan yang diperoleh sebagai akibat berkumpulnya perusahaan pada tempat tertentu. Untuk mengukur aglomerasi, Suahasil Nasara (1994) dan Suryaningrum (2000)

mendefinisikan aglomerasi sebagai proporsi jumlah penduduk perkotaan (*urban area*) terhadap jumlah penduduk wilayah yang bersangkutan.

#### 2.1.7. Teknologi

Kemajuan teknologi menimbulkan beberapa akibat yang positif dalam pertumbuhan ekonomi, dan oleh karenanya pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat (Sadono Sukirno, 1999). Akibat adanya kemajuan teknologi antara lain : (1) mempertinggi efisiensi produksi, (2) menimbulkan penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksi sebelumnya, (3) meninggikan mutu barang-barang yang diproduksi (Sadono Sukirno, 1999).

Budiono (1995), negara-negara yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang mantap dalam jangka waktu yang cukup lama dijumpai bahwa kemajuan teknologi merupakan sumber pertumbuhan output yang sangat penting. Dengan demikian teknologi merupakan variabel yang cukup penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini teknologi dilihat dalam 2 kategori, yaitu teknologi moderen dan teknologi tradisional.

Berdasarkan beberapa kajian teori tersebut disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan posisi perekonomian suatu wilayah dipengaruhi oleh investasi, sumber daya manusia, sumber daya alam, aglomerasi dan teknologi.

## 2.2. Studi Terdahulu

Kajian terhadap beberapa studi topik sejenis dengan penelitian ini yang berhasil ditemui antara lain :

- 1) Suryaningrum (2000), meneliti pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia, menggunakan teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Robert Solow. Berdasarkan model pertumbuhan dari Giaratani dan Suroso (1995) maka untuk kegunaan analisis kuantitatif model tersebut diestimasi menjadi persamaan sebagai berikut :

$$\text{Ln } Y_{it} = A + \alpha_1 \text{Ln } P_{it} + \alpha_2 \text{Ln } K_{it} + \alpha_3 \text{Ln } L_{it} + \alpha_4 \text{Ln } H_{it} + e$$

$\text{Ln } Y_{it}$  = Pendapatan Regional Domestik Brutto atas dasar harga berlaku

$\text{Ln } P_{it}$  = Aglomerasi, dinyatakan sebagai proporsi jumlah penduduk perkotaan (*urban area*) terhadap jumlah penduduk propinsi tersebut.

$\text{Ln } K_{it}$  = Modal, dinyatakan pembentukan modal tetap domestik bruto, dalam rupiah.

$\text{Ln } L_{it}$  = Tenaga kerja, dihitung dari jumlah penduduk umur 10 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu untuk laki-laki dan perempuan yang bekerja di kota dan di desa dalam satuan orang.



$\ln H_{it}$  = Indeks mutu modal manusia, dihitung dari rata-rata lamanya bersekolah seluruh penduduk berumur 10 tahun ke atas di propinsi yang bersangkutan dalam angka indeks.

Data yang digunakan merupakan dalam time series untuk periode tahun 1983 – 1996. Kelemahannya model tersebut terjadi multikolinear, sehingga variabel indeks mutu modal manusia dikeluarkan dari model. Dengan demikian tidak dapat diketahui pengaruh variabel indeks mutu modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa masing-masing propinsi di Indonesia memiliki karakteristik faktor produksi yang sangat beragam, sehingga pengambilan kebijakan tiap-tiap daerah akan sangat berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya.

- 2) Suahazil Nazara (1994), meneliti pertumbuhan ekonomi regional Indonesia dengan data tahunan pada 26 Propinsi di Indonesia 1985 s/d 1991. Model yang diestimasi adalah fungsi produksi agregat yang digunakan adalah bahwa pendapatan regional dipengaruhi oleh kapital, tenaga kerja, dan mutu modal manusia. Spesifikasi model yang diestimasi sebagai berikut :

$$\ln Y_{it} = A + \varphi \ln P_{it} + \alpha_1 \ln K_{it} + \alpha_2 \ln L_{it} + \alpha_3 \ln H_{it}$$

Hasil koefisien regresi menunjukkan bahwa efek tertinggi dari seluruh variabel bebas adalah mutu modal manusia kemudian diikuti oleh tenaga kerja, modal dan aglomerasi. Dengan demikian hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa mutu modal manusia ternyata mempunyai efek tertinggi, di mana pada penelitian Suryaningrum (2000) tidak dapat diketahui pengaruhnya.

- 3) Sjafrizal (1997), meneliti pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional wilayah Indonesia bagian Barat dengan data tahunan 1987 s/d 1995. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan propinsi di wilayah Indonesia bagian Barat menurut Tipologi Klassen dan Indeks Williamson. Disimpulkan bahwa secara relatif perkembangan pembangunan regional di wilayah Bagian Barat ternyata lebih baik dibandingkan dengan keadaan rata-rata seluruh Indonesia, baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan antar wilayah.
- 4) Neni Pancawati (2000), meneliti pengaruh rasio kapital tenaga kerja, tingkat pendidikan, stok kapital dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pertumbuhan GDP Indonesia pada tahun 1968 s/d 1997. Dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi dipakai pendekatan fungsi produksi:  $Y = g(K, L)$ , model tersebut memperlihatkan bahwa output dihasilkan oleh berbagai faktor input seperti modal fisik (K) angkatan kerja (L), modal manusia (H: pendidikan dan kesehatan), sumber daya alam (R: lahan, bahan tambang dan lingkungan). Diperoleh hasil bahwa variabel penjelas yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan GDP di Indonesia adalah rasio kapital tenaga kerja, tingkat perubahan stok dan tingkat pertumbuhan penduduk.

- 5) Hairul Aswandi & Mudradjat Kuncoro (2002), dalam evaluasi penetapan kawasan andalan di Kalimantan Selatan tahun 1993 – 1999. Alat analisis yang digunakan adalah model regresi logistik multinomial sebagai berikut :

$$D4 = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Di mana :

D4 = Klasifikasi Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, yaitu :

1 = daerah cepat maju dan cepat tumbuh

2 = daerah maju tapi tertekan

3 = daerah berkembang cepat

4 = daerah relatif tertinggal

X1 = Pertumbuhan PDRB

X2 = PDRB Perkapita

X3 = Spesialisasi Daerah.

Disimpulkan bahwa pertimbangan penetapan kawasan andalan di Kalimantan Timur hanya mengacu pendapatan perkapita dan sub sektor unggulan, sedangkan pertumbuhan PDRB dan spesialisasi daerah ternyata tidak menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan kawasan andalan. Hasil analisis spesialisasi regional menunjukkan bahwa kemampuan kawasan andalan sebagai daerah yang memiliki keterkaitan perekonomian (sektoral) dengan daerah lainnya masih lemah.

6) Rudy Badrudin (1997), menganalisis perkembangan wilayah propinsi

DIY, dengan menggunakan teori interaksi gravitasi sebagai berikut :

$I_{1,2} = a (P_1 P_2) / J^b_{12}$ , yang menunjukkan bahwa :

$I_{1,2}$  = interaksi dalam ruang antara wilayah 1 dan 2

$P_1$  = jumlah penduduk wilayah 1

$P_2$  = jumlah penduduk wilayah 2

$J^b_{12}$  = jarak antara wilayah 1 dan 2

$a$  = konstanta empirik yang besarnya 1

$b$  = konstanta jarak yang besarnya 2

Sedangkan untuk mengetahui potensi yang terdapat di pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui pengamatan terhadap nilai LQ sektoral wilayah. Kesimpulannya bahwa daerah yang paling erat interaksinya dengan Kotamadya Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan adalah Kabupaten Sleman. Dengan demikian Kotamadya Yogyakarta berpotensi dikembangkan menjadi pusat dengan Sleman.

Dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi dipakai pendekatan fungsi produksi sebagaimana digunakan oleh Neni Pancawati (2000), yaitu  $Y = g(K, L)$ , dengan modifikasi menjadi :  $PE = f(INV, SDM, SDA, AG, T)$  di mana  $PE$  = pertumbuhan ekonomi,  $INV$  = investasi,  $SDM$  = sumber daya manusia,  $AG$  = aglomerasi dan  $T$  = teknologi.

Sedangkan dalam menganalisis posisi perekonomian, variabel dependen mengacu pada model yang dikembangkan oleh Aswandi & Kuncoro (2002) dalam evaluasi penetapan kawasan andalan di Kalimantan Selatan. Model tersebut dipakai untuk menganalisis dan menetapkan posisi

perekonomian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Beberapa variabel independen antara lain mengacu pada model yang digunakan oleh Suryaningrum (2000) : modal (investasi) dan indeks mutu modal manusia. Kemudian variabel sumber daya alam merupakan variabel baru yang mengacu pada pendapat Rudy Badrudin (1997) yang menyatakan bahwa ketimpangan pertumbuhan antar wilayah karena adanya potensi sumber daya yang tidak merata. Variabel aglomerasi mengacu pada pendapat Giaratani dan Soeroso dalam Suahasil Nazara (1994), bahwa perbedaan pertumbuhan ekonomi regional disebabkan oleh faktor efisiensi regional yang dipengaruhi oleh keuntungan aglomerasi. Sedangkan variabel teknologi sesuai dengan pendapat Budiono (1995), negara-negara yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang mantap dalam jangka waktu yang cukup lama dijumpai bahwa kemajuan teknologi merupakan sumber pertumbuhan output yang sangat penting.

### 2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Ketimpangan antar wilayah akan terlihat nyata apabila dilakukan identifikasi posisi perekonomian melalui Tipologi Klassen, yang membagi daerah berdasarkan dua indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu : daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growht*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif

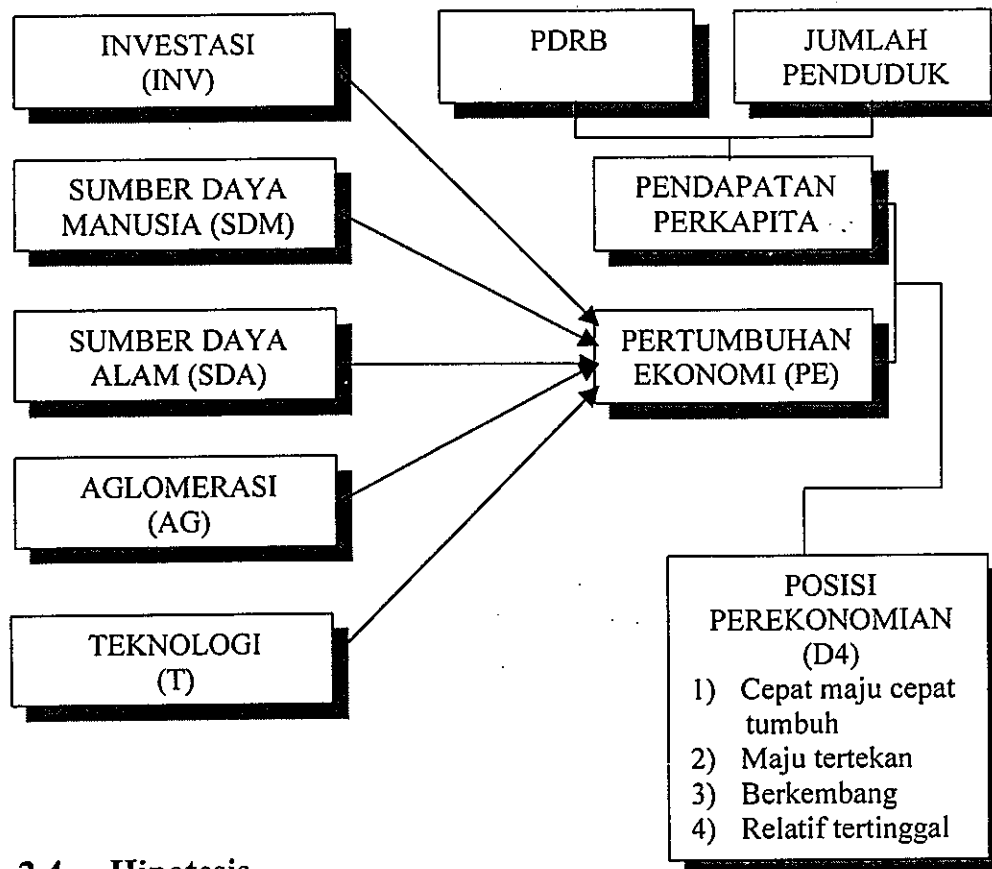
tertinggal (*low growth and low income*) (Syafrizal, 1997, Mudradjat Kuncoro, 1993, Hill, 1989). Jadi penetapannya berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut Giaratani dan Soeroso (1995) dalam Suryaningrum (2000) adalah aglomerasi, modal, tenaga kerja dan indeks mutu modal manusia. Modal dalam hal ini diartikan sebagai investasi. Sedangkan aglomerasi dapat dilihat dari proporsi jumlah penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk daerah yang bersangkutan. Menurut Nugroho (2001) teori pertumbuhan ekonomi moderen lebih menekankan aspek kualitas dari faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, yaitu tenaga kerja atau sumber daya manusia lebih dilihat kualitasnya daripada kuantitasnya. Disamping itu ketimpangan pertumbuhan antar wilayah karena adanya potensi sumber daya alam yang tidak merata (Rudy Badrudin, 1997). Tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi pula oleh teknologi (Budiono, 1995).

Dengan demikian secara teoritis investasi, sumber daya manusia, sumber daya alam, aglomerasi dan teknologi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi pula posisi perekonomian suatu wilayah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disusun suatu kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



## 2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang akan diuji kebenarannya secara empiris. Adapun hipotesis dalam penelitian ini dirinci dalam Tabel 2.1. sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Rincian Hipotesis Penelitian**

No.	Hipotesis
H.1.1.	Investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
H.1.2.	Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
H.1.3.	Sumber daya alam berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
H.1.4.	Aglomerasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
H.1.5.	Teknologi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
H.2.1.	Investasi berpengaruh positif terhadap posisi perekonomian
H.2.2.	Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap posisi perekonomian
H.2.3.	Sumber daya alam berpengaruh positif terhadap posisi perekonomian
H.2.4.	Aglomerasi berpengaruh positif terhadap posisi perekonomian
H.2.5.	Teknologi berpengaruh positif terhadap posisi perekonomian

## 2.5. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Notasi	Definisi
<b>a. <u>Dependen</u> :</b>		
1. Pertumbuhan Ekonomi	PE	PDRB Tahun 2000 atas dasar harga konstan Tahun 1993 dikurangi PDRB Tahun 1999 atas dasar harga konstan Tahun 1993 dibagi PDRB Tahun 1999 atas dasar harga konstan Tahun 1993.
2. Posisi Perekonomian	D4	1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata Propinsi Jawa Tengah, 2) daerah maju tetapi tertekan adalah daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata Propinsi Jawa Tengah,



		3) daerah berkembang cepat adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata Propinsi Jawa Tengah,
		4) daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata Propinsi Jawa Tengah.
<b>b. Independen :</b> 1. Investasi	INV	Jumlah nilai investasi PMDN dan PMA Tahun 2000 di daerah ybs.
2. Sumber daya manusia	SDM <sub>1</sub>	Indeks Mutu Manusia / Human Development Index (HDI) adalah indeks gabungan yang didasarkan pada tingkat harapan hidup, tingkat pendidikan dan standar hidup.
	SDM <sub>2</sub>	Indeks SDM sebagaimana dimaksud dalam PP No.104 tahun 2000, yaitu hasil perhitungan dari : <u>Angkatan Kerja Daerah / Populasi Daerah</u> Jumlah Angkatan kerja Seluruh Daerah / Jumlah Populasi Seluruh Daerah Tahun 2000
	SDM <sub>3</sub>	Angkatan kerja (usia kerja) yang bekerja pada tahun 2000
3. Sumber Daya Alam	SDA <sub>1</sub>	Indeks SDA sebagaimana dimaksud dalam PP No.104 tahun 2000, yaitu hasil perhitungan dari : <u>PDRB Sektor SDA Daerah / PDRB Daerah</u> Jumlah PDRB Sektor SDA Seluruh Daerah / Jumlah PDRB Seluruh Daerah Tahun 2000
	SDA <sub>2</sub>	Jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah yang bersangkutan tahun 2000
	SDA <sub>3</sub>	Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah ybs tahun 2000
4. Aglomerasi	AG	Prosentasi jumlah penduduk perkotaan terhadap jumlah seluruh penduduk wilayah yang bersangkutan (%)
5. Teknologi	T	Dummy, 1 = moderen (kota), 0 = bukan moderen (bukan kota).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data cross section tahun 2000.

Adapun data tersebut bersumber dari :

- 1) BPS Propinsi Jawa Tengah
- 2) BPS Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
- 3) Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah
- 4) Instansi lain yang terkait dengan penelitian ini.

#### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Wawancara, yaitu wawancara langsung dengan petugas/pejabat di lingkungan Kantor Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebagai pelengkap.
- 2) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan.
- 3) Dokumentasi dari berbagai publikasi, laporan, buku literatur, majalah, jurnal dan makalah yang mendukung penelitian.

### 3.3. Teknik Analisis

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka secara ringkas teknik analisis dapat dilihat pada kerangka analisis sebagai berikut :

#### 1) Statistik Deskriptif

Untuk mengetahui posisi perekonomian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dipakai alat analisis Tipologi Klassen, yaitu membagi daerah berdasarkan 2 indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah Tahun 2000. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita pada sumbu horizontal daerah yang diamati dapat dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu : (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh, (2) daerah maju tetapi tertekan, (3) daerah berkembang cepat, dan (4) daerah relatif tertinggal. Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah dalam penelitian ini adalah : (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata Propinsi Jawa Tengah, (2) daerah maju tetapi tertekan adalah daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata Propinsi Jawa Tengah, (3) daerah berkembang cepat adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata Propinsi Jawa Tengah, dan (4) daerah relatif tertinggal adalah daerah yang

memiliki pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata Propinsi Jawa Tengah. Dari hasil analisis tersebut masing-masing Kabupaten/Kota diberi kode 1, 2, 3, atau 4 sesuai posisi daerah yang bersangkutan.

## 2) Analisis Regresi

### a). Regresi Linier Berganda Metode *Ordinary Least Square (OLS)*

Untuk menganalisis pengaruh investasi, sumber daya manusia, sumber daya alam, aglomerasi dan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi digunakan analisis regresi linier berganda dengan metode *ordinary least square (OLS)* dengan bantuan paket program aplikasi SPSS versi 10. Estimasi dilakukan melalui beberapa skenario dengan mencoba menggunakan data yang berbeda sesuai definisi operasional khususnya pada variabel SDM dan SDA. Adapun model dasar yang diestimasi sebagai berikut :

$$PE = \alpha_0 + \alpha_1 INV_i + \alpha_2 SDM_i + \alpha_3 SDA_i + \alpha_4 AG_i + \alpha_5 T + u_i \quad (3.1)$$

di mana :

PE = pertumbuhan ekonomi (%)

INV = jumlah nilai investasi PMDN & PMA (Rp)

SDM = 1) Indeks Mutu Manusia / Human Development Index (HDI) adalah indeks gabungan yang didasarkan pada tingkat harapan hidup, tingkat pendidikan dan standar hidup.

- 2) Indeks SDM sebagaimana dimaksud dalam PP No.104

tahun 2000, yaitu hasil perhitungan dari :

Angkatan Kerja Daerah / Populasi Daerah

Jumlah Angkatan kerja Seluruh Daerah /

Jumlah Populasi Seluruh Daerah Tahun 2000

- 3) Angkatan kerja (penduduk usia kerja) yang bekerja pada tahun 2000

SDA = 1) Indeks SDA sebagaimana dimaksud dalam PP No.104

tahun 2000, yaitu hasil perhitungan dari :

PDRB Sektor SDA Daerah / PDRB Daerah

Jumlah PDRB Sektor SDA Seluruh Daerah /

Jumlah PDRB Seluruh Daerah Tahun 2000

- 2) Jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah yang bersangkutan tahun 2000.

- 3) Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah ybs tahun 2000

AG = aglomerasi, yaitu prosentase penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk keseluruhan

T = Dummy, 1 = moderen (kota), 0 = bukan moderen (bukan kota)

$\alpha_0$  = konstanta,  $\alpha_1 - \alpha_5$  = parameter yang diestimasi

### b). Regresi Logistik Multinomial

Untuk menganalisis pengaruh investasi, sumber daya manusia, sumber daya alam, aglomerasi dan teknologi terhadap posisi perekonomian suatu daerah berada pada posisi : cepat maju dan cepat tumbuh, maju tertekan, berkembang cepat dan relatif tertinggal digunakan analisis yang dapat membedakan posisi perekonomian tersebut. Estimasi dilakukan melalui beberapa skenario dengan mencoba menggunakan data yang berbeda sesuai definisi operasional khususnya pada variabel SDM dan SDA. Model yang digunakan adalah model *regresi logistik multinomial*, dengan spesifikasi model yang dimodifikasi dari model yang dipakai Kuncoro (2001) sebagai berikut:

$$D4 = \beta_0 + \beta_1 INV + \beta_2 SDM + \beta_3 SDA + \beta_4 AG + T \dots\dots\dots(3.2.)$$

Keterangan :

D4 = Posisi perekonomian :

1 = daerah cepat maju dan cepat tumbuh, 2 = daerah maju tapi tertekan, 3 = daerah berkembang cepat, 4 = daerah relatif tertinggal.

INV = jumlah nilai investasi PMDN & PMA (Rp)

SDM = 1) Indeks Mutu Manusia / Human Development Index (HDI) adalah indeks gabungan yang didasarkan pada tingkat harapan hidup, tingkat pendidikan dan standar hidup.

- 2) Indeks SDM sebagaimana dimaksud dalam PP No.104 tahun 2000, yaitu hasil perhitungan dari :

Angkatan Kerja Daerah / Populasi Daerah

$$\frac{\text{Jumlah Angkatan kerja Seluruh Daerah} /}{\text{Jumlah Populasi Seluruh Daerah Tahun 2000}}$$

- 3) Angkatan kerja (penduduk usia kerja) yang bekerja pada tahun 2000

- SDA = 1) Indeks SDA sebagaimana dimaksud dalam PP No.104 tahun 2000, yaitu hasil perhitungan dari :

PDRB Sektor SDA Daerah / PDRB Daerah

$$\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor SDA Seluruh Daerah} /}{\text{Jumlah PDRB Seluruh Daerah Tahun 2000}}$$

- 2) Jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah yang bersangkutan tahun 2000

- 3) Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah ybs tahun 2000

AG = aglomerasi, yaitu prosentase penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk keseluruhan

T = Dummy, 1 = moderen (kota), 0 = bukan moderen (bukan kota)

$\beta_{0..n}$  = Parameter yang diestimasi.

### 3) Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

#### a) Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui terjadinya multikolinearitas dilihat melalui matriks korelasi antara variabel bebas. Jika terdapat koefisien korelasi  $> 0,70$  maka terdapat korelasi yang tinggi diantara variabel bebas, jika lebih kecil dari  $0,70$  maka tidak terjadi multikolinear. Secara sederhana dapat dilihat pula melalui nilai  $R^2$ , bila nilai  $R^2$  tinggi (mendekati 1), tetapi tidak ada variabel bebas yang signifikan mengindikasikan adanya multikolinearitas.

#### b) Uji Normality

Untuk mengetahui normal atau tidaknya faktor gangguan  $u_t$  akan dilakukan melalui Jarque-Bera Test atau J-B Test. Uji ini menggunakan hasil estimasi residual dan chi-square probability distribution. Hasil pengujian menghasilkan nilai J-B hitung. Jika nilai JB-hitung  $<$  nilai  $\lambda^2$  (dari probabilitasnya), maka model empiris yang digunakan memiliki residual atau faktor pengganggu yang berdistribusi normal.

#### c) Uji Linearity

Dalam penelitian ini uji linearitas akan digunakan uji Ramsey (Ramsey RESET Test). Dari hasil perhitungan nilai F-hitung dibandingkan dengan F-tabel, jika  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$  maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa spesifikasi model yang digunakan dalam bentuk fungsi linier adalah ditolak. Jika  $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$  maka hipotesis nol yang menyatakan spesifikasi model dalam bentuk fungsi linier adalah benar.



#### d) Heteroskedastisitas

Untuk menguji adanya heteroscedasticity akan dilakukan melalui Uji Park (Gujarati, 1995:108). Uji ini terdapat 2 tahapan yaitu : pertama, melaksanakan regresi OLS dengan tidak memandang persoalan heteroskedastisitas dan didapatkan nilai  $e_i$ , kedua, melakukan regresi sebagai berikut :

$$\ln e_i^2 = \alpha + \beta \ln X_i + v_i$$

Jika nilai  $\beta$  signifikan secara statistik, maka data terdapat heteroskedastisitas, jika tidak signifikan maka asumsi homoskedastisitas dapat diterima.

#### e) Autokorelasi

Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dilakukan melalui Durbin Watson d Test (Gujarati, 1995 : 442), dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melakukan regresi OLS dan didapatkan residual  $e_i$ .
- Menghitung nilai d melalui rumus :

$$d = \frac{\sum_{i=2}^{i=n} (e_i - e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^{i=n} e_i^2}$$

- Mencari nilai kritis dL dan dU sesuai ukuran sampel dan banyaknya variabel.
- Jika  $dU < d < 4 - dU$  maka tidak terjadi autokorelasi.
- Jika  $d > dL$  atau  $d > 4 - dL$  maka terjadi autokorelasi

- Jika  $dL \leq d \leq dU$  atau  $4 - dU \leq d \leq 4 - dL$ , tidak meyakinkan dan perlu dicari alternatif alat analisis lain.

### 3.4. Prosedur Analisis Dan Justifikasi Statistik

Analisis tipologi Klassen diperoleh daerah-daerah dengan 4 klasifikasi, yaitu : (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh, (2) daerah maju tetapi tertekan, (3) daerah berkembang cepat, dan (4) daerah relatif tertinggal. Hasilnya menjadi variabel D4 pada model regresi logistik multinomial.

Analisis regresi metode *ordinary least square (OLS)*, dilakukan dengan menguji signifikansi dari variabel-variabel yang diamati dengan membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabelnya. Melalui print-out program aplikasi SPSS, taraf signifikansinya dapat dilihat dari nilai probabilitas (p-valuenya). Hipotesis statistik ( $H_0$ ) ditolak apabila p-value  $<$  atau  $=$  alpha 10%.

Analisis model regresi logistik multinomial diuji kecocokan modelnya dengan membandingkan variabel bebas dengan konstantanya, dimana kemampuan model dalam membedakan posisi perekonomian dilihat dari signifikansi nilai Chi-Square melalui p-value nya.

Untuk menguji kemampuan peramalan dari model dilihat dari prosentase kebenaran (*percent correct*) dalam peramalan. Sedangkan untuk mengetahui tingkat signifikansi digunakan kriteria statistik Wald dengan taraf signifikansi sebesar 10%.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

#### **4.1. Letak Geografi**

Jawa Tengah sebagai salah satu propinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua propinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur, berlokasi antara  $5^{\circ} 40'$  dan  $8^{\circ} 30'$  Lintang Selatan dan antara  $108^{\circ} 30'$  dan  $111^{\circ} 30'$  Bujur Timur (termasuk pulau Karimunjawa) Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk pulau Karimunjawa).

#### **4.2. Penggunaan Lahan**

Secara administratif Propinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah Jawa Tengah pada tahun 2000 tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia). Luas yang ada terdiri dari 988 ribu hektar (30,67 persen) bukanlah sawah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya luas lahan sawah tahun 2000 menurun sebesar 0,43 persen. Sebaliknya luas bukan lahan sawah meningkat sebesar 0,19 persen. Adapun luas penggunaan lahan menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2000 sebagai berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Luas Penggunaan Lahan Menurut Kabupaten/Kota**  
**Di Jawa Tengah Tahun 2000 (ha)**

	Kabupaten/Kota	Lahan Sawah	Bukan Lahan Sawah	Jumlah
1	Kab.Cilacap	63,097	150,754	213,851
2	Kab.Banyumas	33,022	99,737	132,759
3	Kab.Purbalingga	20,934	56,831	77,765
4	Kab.Banjarnegara	16,168	90,806	106,974
5	Kab.Kebumen	39,768	88,506	128,274
6	Kab.Purworejo	30,234	73,248	103,482
7	Kab.Wonosobo	18,404	80,064	98,468
8	Kab.Magelang	39,759	68,814	108,573
9	Kab.Boyolali	22,628	78,879	101,507
10	Kab.Klaten	33,670	31,886	65,556
11	Kab.Sukoharjo	21,132	25,534	46,666
12	Kab.Wonogiri	30,620	151,617	182,237
13	Kab.Karanganyar	23,121	54,099	77,220
14	Kab.Sragen	39,943	54,706	94,649
15	Kab.Grobogan	59,769	137,816	197,585
16	Kab.Blora	46,794	132,646	179,440
17	Kab.Rembang	29,116	72,294	101,410
18	Kab.Pati	58,504	90,616	149,120
19	Kab.Kudus	21,681	20,836	42,517
20	Kab.Jepara	26,434	73,982	100,416
21	Kab.Demak	50,839	38,904	89,743
22	Kab.Semarang	24,557	70,129	94,686
23	Kab.Temanggung	20,653	66,370	87,023
24	Kab.Kendal	27,735	72,492	100,227
25	Kab.Batang	22,537	56,358	78,895
26	Kab.Pekalonga	26,471	57,142	83,613
27	Kab.Pemalang	38,356	62,834	101,190
28	Kab.Tegal	40,923	47,047	87,970
29	Kab.Brebes	63,376	102,397	165,773
30	Kota Magelang	267	1,545	1,812
31	Kota Surakarta	126	4,277	4,403
32	Kota Salatiga	791	4,505	5,296
33	Kota Semarang	4,008	33,359	37,367
34	Kota Pekalongan	1,512	2,984	4,496
35	Kota Tegal	1,059	2,390	3,449
	<b>JUMLAH</b>	<b>998,008</b>	<b>2,256,404</b>	<b>3,254,412</b>

Sumber : BPS Prop.Jateng, Jawa Tengah Dalam Angka, 2001

### 4.3. Kependudukan

Jumlah penduduk Jawa Tengah berdasar Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2000, tercatat sebesar 30,78 juta jiwa atau sekitar 15% dari jumlah penduduk Indonesia, dan menempati urutan ke tiga dari seluruh propinsi di Pulau Jawa. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan), sebesar 98%.

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu 5 tahun (1996 – 2000) cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, pada tahun 2000 tercatat sebesar 946 jiwa setiap kilometer persegi. Jumlah penduduk dan angkatan kerja Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota tahun 2000 disajikan pada Tabel 4.2. sebagai berikut :

**Tabel 4.2.**  
**Penduduk dan Angkatan Kerja Jawa Tengah**  
**Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000**

	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Angkatan Kerja
1	Kab.Cilacap	794,010	806,824	1,600,834	1,008,958
2	Kab.Banyumas	738,584	709,281	1,447,865	949,370
3	Kab.Purbalingga	381,240	401,474	782,714	506,840
4	Kab.Banjarnegara	423,938	407,389	831,327	555,793
5	Kab.Kebumen	577,885	583,037	1,160,922	706,319
6	Kab.Purworejo	358,270	345,421	703,691	445,311
7	Kab.Wonosobo	369,009	361,668	730,677	464,040
8	Kab.Magelang	541,931	550,845	1,092,776	718,390
9	Kab.Boyolali	431,277	460,086	891,363	588,434
10	Kab.Klaten	539,711	567,766	1,107,477	736,774
11	Kab.Sukoharjo	381,589	387,163	768,752	517,258
12	Kab.Wonogiri	482,723	483,548	966,271	642,193
13	Kab.Karanganyar	379,235	375,567	754,802	513,168
14	Kab.Sragen	417,075	425,684	842,759	561,269
15	Kab.Grobogan	614,312	643,646	1,257,958	819,532
16	Kab.Blora	409,663	398,780	808,443	545,291
17	Kab.Rembang	273,140	281,550	554,690	351,058
18	Kab.Pati	554,019	590,281	1,144,300	785,330
19	Kab.Kudus	350,985	350,552	701,537	491,034
20	Kab.Jepara	488,602	474,307	962,909	643,635
21	Kab.Demak	483,049	482,450	965,499	616,908
22	Kab.Semarang	411,878	416,291	828,169	539,575
23	Kab.Temanggung	331,252	328,629	659,881	447,306
24	Kab.Kendal	410,419	434,951	845,370	552,442
25	Kab.Batang	318,245	340,076	658,321	427,331
26	Kab.Pekalonga	395,296	399,748	795,044	495,867
27	Kab.Pemalang	621,792	631,914	1,253,706	794,132
28	Kab.Tegal	684,796	689,586	1,374,382	873,860
29	Kab.Brebes	836,446	852,565	1,689,011	1,079,109
30	Kota Magelang	56,724	59,521	116,245	81,338
31	Kota Surakarta	237,709	251,659	489,368	337,988
32	Kota Salatiga	74,396	75,805	150,201	107,836
33	Kota Semarang	638,207	703,523	1,341,730	950,464
34	Kota Pekalongan	126,176	134,638	260,814	170,557
35	Kota Tegal	119,855	116,183	236,038	157,536
	<b>JUMLAH</b>	<b>15,253,438</b>	<b>15,522,408</b>	<b>30,775,846</b>	<b>20,182,246</b>

Sumber : BPS Prop.Jateng, Jawa Tengah Dalam Angka, 2001

#### **4.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan**

##### **Perkapita**

Melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diketahui kondisi perekonomian regional suatu daerah, sedangkan pendapatan perkapita berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita. Adapun PDRB Jawa Tengah dan pendapatan perkapita atas dasar harga konstan 1993 disajikan dalam Tabel 4.3 di bawah ini :

**Tabel 4.3.**  
**Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) dan Pendapatan Perkapita**  
**Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000**

	Kabupaten/Kota	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (Rp)	Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (Rp)
1	Kab.Cilacap	2,206,677,430,000	1,329,127.59
2	Kab.Banyumas	1,028,604,670,000	695,805.69
3	Kab.Purbalingga	611,664,770,000	732,259.05
4	Kab.Banjarnegara	851,218,960,000	992,760.84
5	Kab.Kebumen	899,383,010,000	772,042.35
6	Kab.Purworejo	684,306,710,000	897,887.12
7	Kab.Wonosobo	522,318,240,000	700,988.22
8	Kab.Magelang	1,054,929,260,000	958,795.62
9	Kab.Boyolali	902,628,450,000	980,791.72
10	Kab.Klaten	1,199,551,880,000	956,415.71
11	Kab.Sukoharjo	1,112,790,800,000	1,425,582.03
12	Kab.Wonogiri	783,586,680,000	707,420.17
13	Kab.Karanganyar	1,193,085,080,000	1,514,920.95
14	Kab.Sragen	696,930,130,000	824,873.84
15	Kab.Grobogan	711,751,540,000	539,665.25
16	Kab.Blora	676,637,680,000	820,474.19
17	Kab.Rembang	504,132,770,000	905,422.24
18	Kab.Pati	940,874,700,000	806,927.90
19	Kab.Kudus	3,087,617,870,000	4,387,559.66
20	Kab.Jepara	989,279,740,000	1,020,967.51
21	Kab.Demak	744,316,440,000	766,614.18
22	Kab.Semarang	1,047,365,800,000	1,257,018.97
23	Kab.Temanggung	697,991,690,000	1,063,526.97
24	Kab.Kendal	1,550,532,380,000	1,772,101.81
25	Kab.Batang	721,649,410,000	1,092,109.25
26	Kab.Pekalonga	862,264,910,000	1,093,198.78
27	Kab.Pemalang	1,089,043,630,000	863,317.25
28	Kab.Tegal	911,693,100,000	661,039.97
29	Kab.Brebes	1,381,023,440,000	841,558.41
30	Kota Magelang	318,423,230,000	2,762,388.02
31	Kota Surakarta	1,302,715,920,000	2,375,450.25
32	Kota Salatiga	254,362,190,000	1,756,790.55
33	Kota Semarang	5,142,532,900,000	3,959,928.10
34	Kota Pekalongan	434,639,680,000	1,663,323.30
35	Kota Tegal	358,969,480,000	1,515,278.50

Sumber : BPS Prop.Jateng, Jawa Tengah Dalam Angka, 2001



#### 4.5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota tahun 2000 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.4.**  
**Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2000**

	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	Kab.Cilacap	5.25
2	Kab.Banyumas	4.03
3	Kab.Purbalingga	2.78
4	Kab.Banjarnegara	1.13
5	Kab.Kebumen	4.67
6	Kab.Purworejo	2.41
7	Kab.Wonosobo	3.94
8	Kab.Magelang	3.50
9	Kab.Boyolali	2.06
10	Kab.Klaten	3.98
11	Kab.Sukoharjo	3.52
12	Kab.Wonogiri	3.54
13	Kab.Karanganyar	4.51
14	Kab.Sragen	2.85
15	Kab.Grobogan	5.55
16	Kab.Blora	2.45
17	Kab.Rembang	4.98
18	Kab.Pati	0.36
19	Kab.Kudus	1.89
20	Kab.Jepara	4.61
21	Kab.Demak	2.89
22	Kab.Semarang	4.78
23	Kab.Temanggung	3.47
24	Kab.Kendal	2.20
25	Kab.Batang	2.01
26	Kab.Pekalonga	2.37
27	Kab.Pemalang	3.71
28	Kab.Tegal	4.90
29	Kab.Brebes	4.56
30	Kota Magelang	3.96
31	Kota Surakarta	4.15
32	Kota Salatiga	3.57
33	Kota Semarang	4.97
34	Kota Pekalongan	3.99
35	Kota Tegal	5.11

Sumber : BPS Prop.Jateng, Jawa Tengah Dalam Angka, 2001

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah positif dengan rata-rata sebesar 3,56% di mana pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Grobogan sebesar 5,55% dan terendah terjadi di Kabupaten Pati sebesar 0,36%.

#### 4.6. Posisi Perekonomian

Penentuan posisi perekonomian menurut Tipologi Klassen (Kuncoro, 1993) dilakukan dengan membagi daerah berdasarkan dua indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu : daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Syafriзал, 1997, Kuncoro, 1993, Hill, 1989).

Berdasarkan kriteria tersebut posisi perekonomian kabupaten/kota di Jawa Tengah sebagai berikut :

**Tabel 4.5.**  
**Posisi Perekonomian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**  
**Tahun 2000 Menurut Tipologi Klassen**

	Kabupaten/Kota	Posisi Perekonomian	Keterangan
1	Kab.Cilacap	1	1). daerah cepat maju cepat tumbuh 2). daerah maju tertekan 3). daerah berkembang cepat 4). daerah relatif tertinggal
2	Kab.Banyumas	3	
3	Kab.Purbalingga	4	
4	Kab.Banjarnegara	4	
5	Kab.Kebumen	3	
6	Kab.Purworejo	4	
7	Kab.Wonosobo	3	
8	Kab.Magelang	4	
9	Kab.Boyolali	4	
10	Kab.Klaten	3	
11	Kab.Sukoharjo	2	
12	Kab.Wonogiri	4	
13	Kab.Karanganyar	1	
14	Kab.Sragen	4	
15	Kab.Grobogan	3	
16	Kab.Blora	4	
17	Kab.Rembang	3	
18	Kab.Pati	4	
19	Kab.Kudus	2	
20	Kab.Jepara	3	
21	Kab.Demak	4	
22	Kab.Semarang	3	
23	Kab.Temanggung	4	
24	Kab.Kendal	2	
25	Kab.Batang	4	
26	Kab.Pekalongan	4	
27	Kab.Pemalang	3	
28	Kab.Tegal	3	
29	Kab.Brebes	3	
30	Kota Magelang	1	
31	Kota Surakarta	1	
32	Kota Salatiga	1	
33	Kota Semarang	1	
34	Kota Pekalongan	1	
35	Kota Tegal	1	

Sumber : BPS Prop.Jateng, Jawa Tengah Dalam Angka, 2001, diolah

Berdasarkan posisi tersebut, kabupaten/kota yang merupakan daerah cepat maju dan cepat tumbuh sebanyak 8 daerah, daerah maju tertekan sebanyak 3 daerah, daerah berkembang cepat 11 daerah dan daerah relatif tertinggal sebanyak 13 daerah.

#### 4.7. Investasi

Nilai investasi PMDN dan PMA Tahun 2000 kabupaten/kota di Jawa

Tengah seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 4.6.**  
**Nilai Investasi PMDN dan PMA Menurut**  
**Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2000**

Kabupaten/Kota		Investasi PMDN & PMA (Jutaan Rp)
1	Kab.Cilacap	317,850.83
2	Kab.Banyumas	59,623.00
3	Kab.Purbalingga	100,725.53
4	Kab.Banjarnegara	24,324.00
5	Kab.Kebumen	57,993.00
6	Kab.Purworejo	34,873.00
7	Kab.Wonosobo	19,634.48
8	Kab.Magelang	41,373.74
9	Kab.Boyolali	84,183.67
10	Kab.Klaten	62,783.00
11	Kab.Sukoharjo	76,712.83
12	Kab.Wonogiri	39,552.00
13	Kab.Karanganyar	79,895.71
14	Kab.Sragen	44,991.98
15	Kab.Grobogan	28,753.00
16	Kab.Blora	35,628.00
17	Kab.Rembang	30,571.00
18	Kab.Pati	19,074.49
19	Kab.Kudus	34,558.23
20	Kab.Jepara	113,738.20
21	Kab.Demak	87,237.86
22	Kab.Semarang	203,913.52
23	Kab.Temanggung	30,790.74
24	Kab.Kendal	90,171.02
25	Kab.Batang	58,920.43
26	Kab.Pekalongan	59,689.49
27	Kab.Pemalang	28,672.74
28	Kab.Tegal	68,310.49
29	Kab.Brebes	25,121.74
30	Kota Magelang	6,877.74
31	Kota Surakarta	189,141.55
32	Kota Salatiga	59,236.02
33	Kota Semarang	554,878.21
34	Kota Pekalongan	94,337.86
35	Kota Tegal	97,857.71

Sumber : Badan Penanaman Modal Jawa Tengah, diolah

Data tersebut menunjukkan bahwa nilai investasi PMDN dan PMA terbesar di Kota Semarang yaitu sebesar Rp 554,9 trilyun dan terkecil di Kota Magelang, yaitu Rp. 6,9 milyar.

#### 4.8. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi yang penting. Kondisi sumber daya manusia dapat dilihat dari Indeks Pengembangan Manusia (*Human Development Index/HDI*) yang merupakan indeks gabungan dari 3 indikator yaitu tingkat harapan hidup, tingkat pendidikan (diukur melalui tingkat melek huruf dan lamanya sekolah), serta standar hidup (diukur melalui pengeluaran perkapita).

Nilai indeks berkisar antara 0 – 100.  $HDI < 0,50$  artinya tingkat pengembangan rendah,  $HDI = 0,51 - 0,79$  berarti tingkat pengembangan menengah,  $HDI > 0,80$  artinya tingkat pengembangan manusia tinggi. Berdasarkan kriteria tersebut Indeks Pengembangan Manusia di Jawa Tengah tahun 2000 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.7.**  
**Indeks Pengembangan Manusia**  
**Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2000**

	Kabupaten/Kota	Indeks Pengembangan Manusia <i>Human Development Index (HDI)</i>
1	Kab.Cilacap	63.10
2	Kab.Banyumas	66.00
3	Kab.Purbalingga	63.00
4	Kab.Banjarnegara	63.60
5	Kab.Kebumen	64.90
6	Kab.Purworejo	65.30
7	Kab.Wonosobo	63.90
8	Kab.Magelang	65.10
9	Kab.Boyolali	64.40
10	Kab.Klaten	65.10
11	Kab.Sukoharjo	66.50
12	Kab.Wonogiri	64.00
13	Kab.Karanganyar	64.50
14	Kab.Sragen	62.30
15	Kab.Grobogan	64.70
16	Kab.Blora	61.60
17	Kab.Rembang	64.70
18	Kab.Pati	65.20
19	Kab.Kudus	66.00
20	Kab.Jepara	65.30
21	Kab.Demak	65.90
22	Kab.Semarang	67.90
23	Kab.Temanggung	67.10
24	Kab.Kendal	62.10
25	Kab.Batang	63.60
26	Kab.Pekalongan	61.80
27	Kab.Pemalang	60.70
28	Kab.Tegal	62.20
29	Kab.Brebes	60.20
30	Kota Magelang	70.20
31	Kota Surakarta	70.50
32	Kota Salatiga	71.50
33	Kota Semarang	70.20
34	Kota Pekalongan	65.90
35	Kota Tegal	65.30

*Sumber : BPS Prop.Jateng, 2001*

Berdasarkan indeks pengembangan manusia tersebut, maka semua kabupaten/kota di Jawa Tengah termasuk menengah.

Disamping itu sumber daya manusia menurut Peraturan Pemerintah RI No.104 Tahun 2000 dapat dihitung indeks sumber daya manusia yang ditentukan berdasarkan rasio angkatan kerja daerah terhadap populasi daerah dibagi rasio angkatan kerja seluruh daerah terhadap populasi seluruh daerah. Sedangkan angkatan kerja yang dimaksud adalah jumlah penduduk usia produktif yaitu antara usia 15 – 64 tahun. Berdasar kriteria tersebut indeks sumber daya manusia di Jawa Tengah tahun 2000 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.8.**  
**Indeks Sumber Daya Manusia**  
**Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2000**

Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja Daerah (A)	Populasi Daerah (B)	(A) / (B)	(A) / (B) 0.66 Indeks SDM
1 Kab.Cilacap	1,008,958	1,600,834	0.63	0.96
2 Kab.Banyumas	949,370	1,447,865	0.66	1.00
3 Kab.Purbalingga	506,840	782,714	0.65	0.99
4 Kab.Banjarnegara	555,793	831,327	0.67	1.02
5 Kab.Kebumen	706,319	1,160,922	0.61	0.93
6 Kab.Purworejo	445,311	703,691	0.63	0.96
7 Kab.Wonosobo	464,040	730,677	0.64	0.97
8 Kab.Magelang	718,390	1,092,776	0.66	1.00
9 Kab.Boyolali	588,434	891,363	0.66	1.01
10 Kab.Klaten	736,774	1,107,477	0.67	1.01
11 Kab.Sukoharjo	517,258	768,752	0.67	1.03
12 Kab.Wonogiri	642,193	966,271	0.66	1.01
13 Kab.Karanganyar	513,168	754,802	0.68	1.04
14 Kab.Sragen	561,269	842,759	0.67	1.02
15 Kab.Grobogan	819,532	1,257,958	0.65	0.99
16 Kab.Blora	545,291	808,443	0.67	1.03
17 Kab.Rembang	351,058	554,690	0.63	0.97
18 Kab.Pati	785,330	1,144,300	0.69	1.05
19 Kab.Kudus	491,034	701,537	0.70	1.07
20 Kab.Jepara	643,635	962,909	0.67	1.02
21 Kab.Demak	616,908	965,499	0.64	0.97
22 Kab.Semarang	539,575	828,169	0.65	0.99
23 Kab.Temanggung	447,306	659,881	0.68	1.03
24 Kab.Kendal	552,442	845,370	0.65	1.00
25 Kab.Batang	427,331	658,321	0.65	0.99
26 Kab.Pekalongan	495,867	795,044	0.62	0.95
27 Kab.Pemalang	794,132	1,253,706	0.63	0.97
28 Kab.Tegal	873,860	1,374,382	0.64	0.97
29 Kab.Brebes	1,079,109	1,689,011	0.64	0.97
30 Kota Magelang	81,338	116,245	0.70	1.07
31 Kota Surakarta	337,988	489,368	0.69	1.05
32 Kota Salatiga	107,836	150,201	0.72	1.09
33 Kota Semarang	950,464	1,341,730	0.71	1.08
34 Kota Pekalongan	170,557	260,814	0.65	1.00
35 Kota Tegal	157,536	236,038	0.67	1.02
Jumlah Jawa Tengah	20,182,246	30,775,846	0.66	

Sumber : BPS Prop.Jateng, 2001, diolah

Berdasarkan indeks sumber daya manusia tersebut, maka daerah yang mempunyai indeks tertinggi adalah Kota Salatiga (1,09) dan terendah di Kabupaten Kebumen (0,93).



#### 4.9. Sumber Daya Alam

Menurut Peraturan Pemerintah RI No.104 Tahun 2000 dapat dihitung indeks sumber daya alam yang ditentukan berdasarkan rasio PDRB sektor SDA daerah terhadap PDRB daerah dibagi dengan rasio jumlah PDRB sektor SDA seluruh daerah terhadap jumlah PDRB seluruh daerah. Yang dimaksud dengan PDRB sektor sumber daya alam adalah PDRB dari sektor minyak dan gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan.

Hasil perhitungan indeks sumber daya alam di Jawa Tengah disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.9.**  
**Indeks Sumber Daya Alam**  
**Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2000**

Kabupaten/Kota	PDRB Sektor SDA Daerah (A)	PDRB Daerah (B)	(A) / (B)	(A) / (B)
				0,25 Indeks SDA
1 Kab.Cilacap	768,285.61	2,206,677.43	0.35	1.39
2 Kab.Banyumas	291,259.48	1,028,604.67	0.28	1.13
3 Kab.Purbalingga	194,567.25	611,664.77	0.32	1.27
4 Kab.Banjarnegara	348,029.88	851,218.96	0.41	1.63
5 Kab.Kebumen	410,742.96	899,383.01	0.46	1.82
6 Kab.Purworejo	258,157.82	684,306.71	0.38	1.51
7 Kab.Wonosobo	273,782.42	522,318.24	0.52	2.09
8 Kab.Magelang	357,956.82	1,054,929.26	0.34	1.36
9 Kab.Boyolali	306,304.60	902,628.45	0.34	1.36
10 Kab.Klaten	239,408.76	1,199,551.88	0.20	0.80
11 Kab.Sukoharjo	253,063.43	1,112,790.80	0.23	0.91
12 Kab.Wonogiri	404,948.06	783,586.68	0.52	2.06
13 Kab.Karanganyar	242,532.95	1,193,085.08	0.20	0.81
14 Kab.Sragen	295,330.25	696,930.13	0.42	1.69
15 Kab.Grobogan	362,845.97	711,751.54	0.51	2.04
16 Kab.Blora	357,880.84	676,637.68	0.53	2.11
17 Kab.Rembang	241,141.30	504,132.77	0.48	1.91
18 Kab.Pati	430,072.11	940,874.70	0.46	1.83
19 Kab.Kudus	101,443.32	3,087,617.87	0.03	0.13
20 Kab.Jepara	226,851.35	989,279.74	0.23	0.92
21 Kab.Demak	331,873.35	744,316.44	0.45	1.78
22 Kab.Semarang	192,785.93	1,047,365.80	0.18	0.74
23 Kab.Temanggung	236,046.92	697,991.69	0.34	1.35
24 Kab.Kendal	321,048.22	1,550,532.38	0.21	0.83
25 Kab.Batang	209,457.12	721,649.41	0.29	1.16
26 Kab.Pekalongan	152,920.69	862,264.91	0.18	0.71
27 Kab.Pemalang	383,255.23	1,089,043.63	0.35	1.41
28 Kab.Tegal	266,420.46	911,693.10	0.29	1.17
29 Kab.Brebes	749,864.09	1,381,023.44	0.54	2.17
30 Kota Magelang	9,676.84	318,423.23	0.03	0.12
31 Kota Surakarta	20,381.73	1,302,715.92	0.02	0.06
32 Kota Salatiga	16,128.76	254,362.19	0.06	0.25
33 Kota Semarang	53,797.79	5,142,532.90	0.01	0.04
34 Kota Pekalongan	41,410.47	434,639.68	0.10	0.38
35 Kota Tegal	33,968.91	358,969.48	0.09	0.38
Jumlah Jawa Tengah	9,383,641.69	37,475,494.57	0.25	

Sumber : BPS Prop.Jateng, 2001, diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas indeks SDA tertinggi adalah Kabupaten Brebes (2,17) dan terendah Kota Semarang (0,04).

Sedangkan jika ditinjau dari penerimaan PBB dan penerimaan DAU dapat disajikan pada Tabel 4.10 sebagai berikut :

**Tabel 4.10.**  
**Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2000**

Kabupaten/Kota	PBB (Rp)	DAU (Rp)
1 Kab.Cilacap	13,991,130,000.00	176,853,909,000.00
2 Kab.Banyumas	9,437,490,000.00	293,426,137,000.00
3 Kab.Purbalingga	5,544,542,000.00	222,165,392,000.00
4 Kab.Banjarnegara	5,429,863,000.00	202,084,631,000.00
5 Kab.Kebumen	6,546,261,000.00	257,940,190,000.00
6 Kab.Purworejo	5,523,261,000.00	186,865,518,000.00
7 Kab.Wonosobo	5,948,388,000.00	205,065,783,000.00
8 Kab.Magelang	6,223,971,000.00	236,730,370,000.00
9 Kab.Boyolali	6,313,680,000.00	198,610,000,000.00
10 Kab.Klaten	6,030,914,000.00	271,735,512,000.00
11 Kab.Sukoharjo	6,364,087,000.00	146,657,010,000.00
12 Kab.Wonogiri	5,841,886,000.00	224,906,747,000.00
13 Kab.Karanganyar	6,010,303,000.00	190,606,480,000.00
14 Kab.Sragen	5,800,639,000.00	201,809,448,000.00
15 Kab.Grobogan	9,959,623,000.00	232,588,055,000.00
16 Kab.Blora	9,587,189,000.00	285,252,242,000.00
17 Kab.Rembang	6,481,517,000.00	142,956,744,000.00
18 Kab.Pati	9,080,353,000.00	235,478,698,000.00
19 Kab.Kudus	5,667,428,000.00	168,908,406,000.00
20 Kab.Jepara	7,089,407,000.00	233,138,056,000.00
21 Kab.Demak	6,435,048,000.00	140,961,458,000.00
22 Kab.Semarang	7,938,867,000.00	185,881,309,000.00
23 Kab.Temanggung	5,830,447,000.00	173,542,679,000.00
24 Kab.Kendal	7,336,329,000.00	286,810,000,000.00
25 Kab.Batang	5,631,794,000.00	211,883,526,000.00
26 Kab.Pekalongan	5,107,364,000.00	205,220,000,000.00
27 Kab.Pemalang	7,937,242,000.00	195,697,437,000.00
28 Kab.Tegal	8,544,575,000.00	280,223,076,000.00
29 Kab.Brebes	10,467,427,000.00	290,683,475,000.00
30 Kota Magelang	2,929,535,000.00	99,225,880,000.00
31 Kota Surakarta	8,223,364,000.00	111,630,284,000.00
32 Kota Salatiga	3,189,650,000.00	273,658,000,000.00
33 Kota Semarang	23,274,861,000.00	254,262,363,000.00
34 Kota Pekalongan	3,342,171,000.00	79,989,078,000.00
35 Kota Tegal	4,155,305,000.00	178,273,713,000.00
Jumlah Jawa Tengah	253,215,911,000.00	7,281,721,606,000.00

Sumber : BPS Prop.Jateng, 2001.

Data pada Tabel 4.10 tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PBB tertinggi dicapai oleh Kota Semarang, yaitu sebesar Rp 23,3 milyar dan terendah Kota Magelang sebesar Rp 2,9 milyar. Sedangkan penerimaan DAU tertinggi Kabupaten Banyumas sebesar 293,4 milyar dan terendah Kota Pekalongan yaitu sebesar Rp 80 milyar.

#### **4.10. Aglomerasi**

Pertumbuhan ekonomi regional disebabkan oleh faktor efisiensi regional yang dipengaruhi oleh keuntungan aglomerasi. Keuntungan aglomerasi adalah keuntungan yang diperoleh akibat berkumpulnya perusahaan pada tempat tertentu (Suahasil Nazara, 1994). Aglomerasi dapat dilihat dari rasio penduduk perkotaan terhadap populasi penduduk suatu daerah. Aglomerasi di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.11.**  
**Rasio Penduduk Perkotaan Terhadap Jumlah Populasi**  
**Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2000**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Perkotaan	Jumlah Seluruh Penduduk	Aglomerasi
1 Kab.Cilacap	454,067.00	1,600,834.00	0.28
2 Kab.Banyumas	661,395.00	1,447,865.00	0.46
3 Kab.Purbalingga	151,724.00	782,714.00	0.19
4 Kab.Banjarnegara	124,005.00	831,327.00	0.15
5 Kab.Kebumen	289,296.00	1,160,922.00	0.25
6 Kab.Purworejo	175,923.00	703,691.00	0.25
7 Kab.Wonosobo	85,172.00	730,677.00	0.12
8 Kab.Magelang	280,907.00	1,092,776.00	0.26
9 Kab.Boyolali	235,307.00	891,363.00	0.26
10 Kab.Klaten	343,318.00	1,107,477.00	0.31
11 Kab.Sukoharjo	236,186.00	768,752.00	0.31
12 Kab.Wonogiri	164,143.00	966,271.00	0.17
13 Kab.Karanganyar	336,170.00	754,802.00	0.45
14 Kab.Sragen	233,474.00	842,759.00	0.28
15 Kab.Grobogan	177,857.00	1,257,958.00	0.14
16 Kab.Blora	210,195.00	808,443.00	0.26
17 Kab.Rembang	145,757.00	554,690.00	0.26
18 Kab.Pati	297,518.00	1,144,300.00	0.26
19 Kab.Kudus	226,212.00	701,537.00	0.32
20 Kab.Jepara	477,053.00	962,909.00	0.50
21 Kab.Demak	241,375.00	965,499.00	0.25
22 Kab.Semarang	273,296.00	828,169.00	0.33
23 Kab.Temanggung	152,046.00	659,881.00	0.23
24 Kab.Kendal	217,895.00	845,370.00	0.26
25 Kab.Batang	164,580.00	658,321.00	0.25
26 Kab.Pekalongan	355,879.00	795,044.00	0.45
27 Kab.Pemalang	615,797.00	1,253,706.00	0.49
28 Kab.Tegal	357,339.00	1,374,382.00	0.26
29 Kab.Brebes	506,703.00	1,689,011.00	0.30
30 Kota Magelang	104,621.00	116,245.00	0.90
31 Kota Surakarta	440,431.00	489,368.00	0.90
32 Kota Salatiga	120,160.00	150,201.00	0.80
33 Kota Semarang	1,269,502.00	1,341,730.00	0.95
34 Kota Pekalongan	256,579.00	260,814.00	0.98
35 Kota Tegal	177,028.50	236,038.00	0.75

Sumber : BPS Prop.Jateng, 2001, diolah

Berdasarkan data pada Tabel 4.11 diketahui bahwa aglomerasi tertinggi terjadi di Kota Pekalongan yaitu sebesar 0,98 dan terendah di Kabupaten Wonosobo yaitu sebesar 0,12.

#### **4.11. Teknologi**

Tingkat penggunaan teknologi dapat dikelompokkan berdasar kriteria teknologi tradisional dan moderen. Di Jawa Tengah penggunaan teknologi tradisional dapat diasumsikan berada pada daerah Kabupaten dan teknologi moderen pada daerah perkotaan. Dengan demikian berdasar kriteria ini terdapat 29 daerah dengan teknologi tradisional dan 6 daerah dengan teknologi moderen.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan dalam studi ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh investasi, sumber daya manusia, sumber daya alam, aglomerasi dan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi. Disamping itu juga pengaruhnya terhadap posisi perekonomian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data cross section tahun 2000. Estimasi dilakukan dengan bantuan paket program SPSS versi 10.

#### **5.1. Analisis Pertumbuhan Ekonomi**

Sebelum menganalisis posisi perekonomian terlebih dahulu dilakukan analisis pengaruh investasi, sumber daya manusia, sumber daya alam, aglomerasi dan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun model pertumbuhan ekonomi yang diestimasi adalah sebagai berikut :

$$PE = \alpha_0 + \alpha_1 INVi + \alpha_2 SDM_i + \alpha_3 SDA_i + \alpha_4 AG_i + \alpha_5 T + u_i \dots\dots\dots (5.1)$$

di mana :

PE = pertumbuhan ekonomi

INV = investasi

SDM = sumber daya manusia

SDA = sumber daya alam

AG = aglomerasi.

T = Teknologi, Dummy, 1 = moderen (kota), 0 = bukan moderen (bukan kota)

$\alpha_0$  = konstanta

$\alpha_1 - \alpha_5$  = parameter yang diestimasi

Estimasi dilakukan dengan 9 skenario masing-masing menggunakan definisi operasional yang berbeda untuk variabel SDM dan SDA. Adapun spesifikasi model dari 9 skenario yang diestimasi tersebut sebagai berikut :

$$\text{Sk\#1 : PE} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{ INV} + \alpha_2 \text{ SDM}_1 + \alpha_3 \text{ SDA}_1 + \alpha_4 \text{ AG} + \alpha_5 \text{ T} \dots\dots\dots (5.2)$$

$$\text{Sk\#2 : PE} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{ INV} + \alpha_2 \text{ SDM}_1 + \alpha_3 \text{ SDA}_2 + \alpha_4 \text{ AG} + \alpha_5 \text{ T} \dots\dots\dots (5.3)$$

$$\text{Sk\#3 : PE} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{ INV} + \alpha_2 \text{ SDM}_1 + \alpha_3 \text{ SDA}_3 + \alpha_4 \text{ AG} + \alpha_5 \text{ T} \dots\dots\dots (5.4)$$

$$\text{Sk\#4 : PE} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{ INV} + \alpha_2 \text{ SDM}_2 + \alpha_3 \text{ SDA}_1 + \alpha_4 \text{ AG} + \alpha_5 \text{ T} \dots\dots\dots (5.5)$$

$$\text{Sk\#5 : PE} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{ INV} + \alpha_2 \text{ SDM}_2 + \alpha_3 \text{ SDA}_2 + \alpha_4 \text{ AG} + \alpha_5 \text{ T} \dots\dots\dots (5.6)$$

$$\text{Sk\#6 : PE} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{ INV} + \alpha_2 \text{ SDM}_2 + \alpha_3 \text{ SDA}_3 + \alpha_4 \text{ AG} + \alpha_5 \text{ T} \dots\dots\dots (5.7)$$

$$\text{Sk\#7 : PE} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{ INV} + \alpha_2 \text{ SDM}_3 + \alpha_3 \text{ SDA}_1 + \alpha_4 \text{ AG} + \alpha_5 \text{ T} \dots\dots\dots (5.8)$$

$$\text{Sk\#8 : PE} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{ INV} + \alpha_2 \text{ SDM}_3 + \alpha_3 \text{ SDA}_2 + \alpha_4 \text{ AG} + \alpha_5 \text{ T} \dots\dots\dots (5.9)$$

$$\text{Sk\#9 : PE} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{ INV} + \alpha_2 \text{ SDM}_3 + \alpha_3 \text{ SDA}_3 + \alpha_4 \text{ AG} + \alpha_5 \text{ T} \dots\dots\dots (5.10)$$

Angka *subscript* pada variabel SDM dan SDA menunjukkan definisi operasional variabel yang bersangkutan sebagai berikut :

SDM = 1) Indeks Mutu Manusia / Human Development Index (HDI) adalah indeks gabungan yang didasarkan pada tingkat harapan hidup, tingkat pendidikan dan standar hidup.



- 2) Indeks SDM sebagaimana dimaksud dalam PP No.104 tahun 2000,  
yaitu hasil perhitungan dari :

Angkatan Kerja Daerah / Populasi Daerah

Jumlah Angkatan kerja Seluruh Daerah /

Jumlah Populasi Seluruh Daerah Tahun 2000

- 3) Angkatan kerja (penduduk usia kerja) yang bekerja tahun 2000

SDA = 1) Indeks SDA sebagaimana dimaksud dalam PP No.104 tahun 2000,  
yaitu hasil perhitungan dari :

PDRB Sektor SDA Daerah / PDRB Daerah

Jumlah PDRB Sektor SDA Seluruh Daerah /

Jumlah PDRB Seluruh Daerah Tahun 2000

- 2) Jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah yang  
bersangkutan tahun 2000.

- 3) Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah ybs tahun 2000

Hasil estimasi dengan menggunakan 9 skenario diringkas dalam Tabel 5.1.

sebagai berikut :

**Tabel 5.1.**  
**Ringkasan Estimasi Pertumbuhan Ekonomi**  
**Dengan 9 Skenario**

Skenario	INV	SDM	SDA	AG	Dummy	Keterangan
Sk#1 :						
Koef Reg	3,920E-06	3,423E-02	0,762	2,833	-0,457	R <sup>2</sup> = 0,211
t-hitung	1,730	0,305	1,388	1,100	-0,301	DW = 2,458
Prob-Sig	0,094*	0,762	0,176	0,28	0,766	Σ Var.Sig = 1
						α 10%
Sk#2 :						
Koef Reg	1,769E-06	-8,903-03	5,654E-08	0,974	0,15	R <sup>2</sup> = 0,166
t-hitung	0,416	-0,081	0,512	0,434	0,099	DW = 2,288
Prob-Sig	0,680	0,936	0,612	0,667	0,922	Σ Var.Sig = 0

Sk#3 :						
Koef Reg	3,518E-06	-1,66E-02	7,074E-13	0,964	7,732E-02	R <sup>2</sup> = 0,159
t-hitung	1,486	-0,15	0,167	0,427	0,048	DW = 2,239
Prob-Sig	0,148	0,881	0,868	0,673	0,962	Σ Var.Sig = 0
Sk#4 :						
Koef Reg	3,651E-06	-13,237	0,325	1,915	0,485	R <sup>2</sup> = 0,312
t-hitung	1,729	-2,083	0,634	0,808	0,361	DW = 2,199
Prob-Sig	0,094*	0,046**	0,531	0,426	0,721	Σ Var.Sig = 2
						α 10%, 5%
Sk#5 :						
Koef Reg	5,855E-07	-15,331	8,971E-08	1,208	0,910	R <sup>2</sup> = 0,321
t-hitung	0,157	-2,578	0,912	0,598	0,682	DW = 2,124
Prob-Sig	0,877	0,015**	0,369	0,555	0,501	Σ Var.Sig = 1
						α 5%
Sk#6 :						
Koef Reg	3,241E-06	-15,073	2,049E-12	1,245	0,743	R <sup>2</sup> = 0,309
t-hitung	1,535	-2,510	0,539	0,608	0,561	DW = 2,025
Prob-Sig	0,146	0,018**	0,594	0,548	0,579	Σ Var.Sig = 1
						α 5%
Sk#7 :						
Koef Reg	3,651E-06	5,065E-06	0,255	0,378	-0,283	R <sup>2</sup> = 0,939
t-hitung	1,729	18,667	1,680	0,535	-0,735	DW = 2,134
Prob-Sig	0,094*	0,000***	0,104*	0,597	0,468	Σ Var.Sig = 3
						α 10%, 1%, 10%
Sk#8 :						
Koef Reg	3,278E-08	5,945E-06	-2,61E-08	0,980	-0,423	R <sup>2</sup> = 0,935
t-hitung	0,028	18,509	-0,852	1,568	-1,050	DW = 2,047
Prob-Sig	0,978	0,000***	0,401	0,128	0,302	Σ Var.Sig = 1
						α 1%
Sk#9 :						
Koef Reg	-7,63E-07	4,911E-06	2,578E-14	0,998	-0,357	R <sup>2</sup> = 0,933
t-hitung	-1,098	18,347	0,022	1,570	-0,887	DW = 1,961
Prob-Sig	0,281	0,000***	0,983	0,127	0,382	Σ Var.Sig = 1
						α 1%

Keterangan signifikansi : \* = α 10%, \*\* = α 5%, \*\*\* = α 1%

Berdasarkan hasil estimasi beberapa skenario tersebut menunjukkan bahwa skenario 7 mempunyai 3 variabel yang signifikan, yaitu variabel INV signifikan pada alpha 10%, SDM signifikan pada alpha 1% dan SDA signifikan pada alpha 10% dengan nilai  $R^2 = 0,939$ . Dengan demikian Sk#7 merupakan model terbaik dan menunjukkan bahwa SDM lebih cocok dipakai data angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja), sedangkan SDA lebih cocok dipakai pada indeks SDA sebagaimana dimaksud dalam PP No.104 tahun 2000. Ditinjau dari

jumlah variabel yang signifikan, kecocokan tanda dengan teori dan besarnya nilai  $R^2$ , maka skenario 7 merupakan model terbaik dan akan dianalisis lebih lanjut.

Adapun ringkasan hasil estimasi pengujian model Sk#7 dapat disajikan pada Tabel 5.2. sebagai berikut :

**Tabel 5.2.**  
**Ringkasan Hasil Estimasi Model**  
**Pertumbuhan Ekonomi Sk#7**

Variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	Probabilitas-Signifikansi	Keputusan	Pembuktian
Indep.Var.: INV	0,000003651	1,729	0,094*	Ho ditolak	H.1.1. terbukti
SDM	0,000005065	18,667	0,000***	Ho ditolak	H.1.2. terbukti
SDA	0,255	1,680	0,104*	Ho ditolak	H.1.3. terbukti
AG	0,378	0,535	0,597	Ho diterima	H.1.4. tidak terbukti
Dummy	-0,283	-0,735	0,468	Ho diterima	H.1.5. tidak terbukti
Constant	0,933	2,639	0,013		
R <sup>2</sup> : 0,939					
F-hitung : 89,583***					
DW : 2,134					
N : 35					
Σ Var.Indep Signifikan : 3 dari 5					

Keterangan signifikansi : \* =  $\alpha$  10%, \*\* =  $\alpha$  5%, \*\*\* =  $\alpha$  1%

Dari hasil estimasi tersebut dihasilkan persamaan sebagai berikut :

$$PE = 0,933 + 0,000003651 INV^* + 0,000005065 SDM^{***} + 0,255 SDA^* + 0,378 AG - 0,283 T$$

Sebelum melakukan analisis terlebih dahulu dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik terhadap model skenario 7 sebagai berikut :

#### a) Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui terjadinya multikolinearitas dilihat melalui matriks korelasi sebagai berikut :

**Tabel 5.3.**  
**Matriks Koefisien Korelasi**

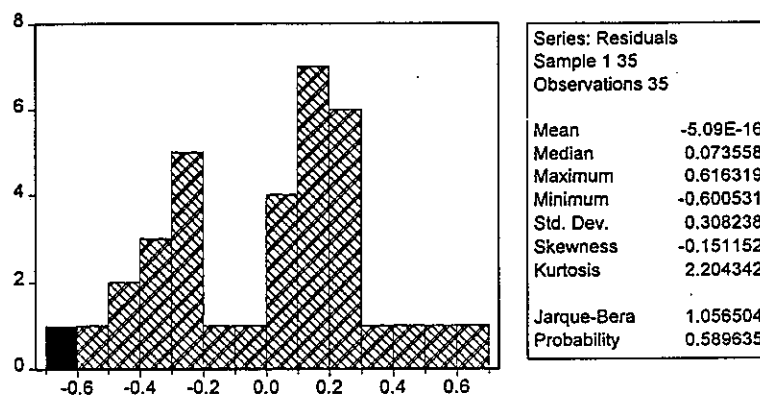
Variabel Independen	INV	SDM	SDA	AG	Dummy
INV	1,000	-0,397	0,266	-0,024	0,014
SDM		1,000	-0,338	-0,173	-0,002
SDA			1,000	0,420	-0,115
AG				1,000	-0,328
Dummy					1,000

Berdasarkan tabel matriks koefisien korelasi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa model tersebut bebas multikolinearitas.

**b) Uji Normality**

Untuk mengetahui normal atau tidaknya faktor gangguan  $u_t$  akan dilakukan melalui Jarque-Bera Test atau J-B Test (Gujarati, 1995), melalui bantuan paket program Eviews yang mempunyai fasilitas untuk uji tersebut. Hasil pengujian sebagai berikut :

**Gambar 5.1.**  
**Hasil Uji Normalitas dengan J-B Test**



Dari hasil uji normalitas di atas diketahui bahwa nilai J-B hitung sebesar  $1,056504 < \text{nilai } \lambda^2 \text{ tabel (dari probabilitas = 0,589635)}$ , artinya bahwa model

empiris yang digunakan memiliki residual atau faktor pengganggu yang berdistribusi normal.

**c) Uji Linearity**

Hasil pengujian linearitas akan digunakan uji Ramsey (Ramsey RESET Test), dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 5.4.**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**Dengan Ramsey RESET Test**

Ramsey RESET Test:			
F-statistic	2.307728	Probability	0.179667
Log likelihood ratio	2.908116	Probability	0.098053

. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai F-hitung  $2,307728 < \text{nilai F-tabel}$  (dari probabilitasnya sebesar 0,179667) maka disimpulkan bahwa spesifikasi model dalam bentuk fungsi linier adalah benar.

**d) Uji Heteroskedastisitas**

Untuk menguji adanya heteroscedasticity akan dilakukan melalui Uji Park (Gujarati, 1995:108), dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 5.5.**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
**Dengan Uji Park**

Dependent Variable: LRES12  
Method: Least Squares  
Date: 01/05/03 Time: 01:30  
Sample: 1 35  
Included observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.239003	9.344700	0.346614	0.7313
LINV	-1.556755	0.588254	-2.646401	0.2128
LSDM	0.838698	0.976114	0.859221	0.3970
LSDA	0.145007	0.301574	0.480835	0.6341
LAG	0.394351	0.664138	0.593778	0.5571
R-squared	0.274355	Mean dependent var	-3.183249	
Adjusted R-squared	0.177602	S.D. dependent var	1.566353	
S.E. of regression	1.420465	Akaike info criterion	3.671410	
Sum squared resid	60.53165	Schwarz criterion	3.893602	
Log likelihood	-59.24967	F-statistic	2.835630	
Durbin-Watson stat	1.791659	Prob(F-statistic)	0.041662	

Berdasarkan hasil uji Park tersebut menunjukkan bahwa dari nilai probabilitasnya tidak ada variabel yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model empiris yang digunakan tidak terdapat heteroskedastisitas.

#### e) Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dilakukan melalui Durbin Watson d Test (Gujarati, 1995 : 442). Dari hasil estimasi pada tabel 5.2. diperoleh nilai DW hitung sebesar 2,134. Nilai DW tabel :  $dL = 1,16$   $dU = 1,80$  ( $n = 35$ , variabel bebas 5). Jadi  $1,80 < 2,134 < 4 - 1,80$  (2,20). Dengan demikian tidak terjadi autokorelasi.

#### Pembahasan

Pengujian hipotesis membuktikan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada alpha 10% ( $P \text{ value} = 0,094$ ), kemudian

SDM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada alpha 1% (p value = 0,000), dan SDA berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada alpha 10% (p value 0,104). Adapun variabel aglomerasi dan teknologi (dummy) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari nilai  $R^2$  sebesar 0,939 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 93,90% dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel investasi, sumber daya manusia, sumber daya alam, aglomerasi dan teknologi (dummy), sedangkan sisanya sebesar 6,10% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Sedangkan dari nilai standar error of estimate sebesar 0,333 lebih kecil dari standar deviasi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,2483 menunjukkan bahwa model regresi lebih baik sebagai prediktor pertumbuhan ekonomi dibandingkan rata-rata variabel pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Hasil pengujian tanda menunjukkan bahwa INV, SDM dan SDA berpengaruh positif, sehingga sesuai dengan harapan teori. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa investasi, SDM dan SDA berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diterima.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa investasi berpengaruh secara signifikan pada alpha 10% (p-value = 0,094) dengan koefisien regresi sebesar 0,000003651, artinya setiap kenaikan investasi sebesar Rp 1 juta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0004% dengan asumsi faktor-faktor lain konstan. Sumber daya manusia berpengaruh signifikan pada alpha 1% (p-value = 0,000) dengan koefisien regresi sebesar 0,000005065 berarti bahwa dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang bekerja sebesar 1000 orang akan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi sebesar 0,005% dengan asumsi faktor-faktor lain tetap. Sumber daya alam berpengaruh secara signifikan pada alpha 10% (p value 0,104) dengan koefisien 0,255 artinya dengan kenaikan indeks sebesar 1 satuan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,255%.

Aglomerasi dengan p-value 0,597 tidak signifikan pada alpha 10% atau dengan kata lain tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini diduga akibat sebaran data yang kurang bervariasi atau hampir merata di mana sebagian besar tingkat aglomerasinya di bawah 0,50, sedangkan yang tingkat aglomerasinya tinggi hanya 6 kota. Demikian pula untuk variabel teknologi (dummy) yang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi diukur dengan 2 kategori, yaitu 0 dan 1 diduga tidak dapat mewakili kondisi yang sebenarnya, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan proksi pengukuran yang lebih tepat.

Hasil analisis tersebut secara ekonomis dapat diinterpretasikan bahwa investasi PMDN & PMA, sumber daya manusia (angkatan kerja yang bekerja) dan SDA (indeks SDA) merupakan variabel penentu bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi. Disamping itu hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Suahazil Nasara (1994) dan Neni Pancawati (2000) yang menunjukkan bahwa investasi dan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sumber daya alam dilihat dari indeks SDA yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan temuan baru.



## 5.2. Analisis Posisi Perekonomian

Telah diuraikan di muka bahwa penentuan posisi perekonomian menurut Tipologi Klassen (Kuncoro, 1993) dilakukan dengan membagi daerah berdasarkan dua indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu : daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Syafrizal, 1997, Kuncoro, 1993, Hill, 1989). Hasil analisis tersebut disajikan pada Tabel 4.5.

Untuk mengetahui pengaruh investasi, sumber daya manusia, sumber daya alam, aglomerasi dan teknologi (dummy), dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap model yang telah ditetapkan sebagai berikut :

$$D4 = \beta_0 + \beta_1 INV + \beta_2 SDM + \beta_3 SDA + \beta_4 AG + \beta_5 T \dots\dots\dots (5.11)$$

Keterangan :

D4 = Posisi perekonomian :

1 = daerah cepat maju dan cepat tumbuh, 2 = daerah maju tapi tertekan, 3 = daerah berkembang cepat, 4 = daerah relatif tertinggal.

INV = investasi

SDM = sumber daya manusia

SDA = sumber daya alam

AG = aglomerasi.

T = Teknologi : Dummy, 1 = moderen (kota), 0 = bukan moderen (bukan kota)

$\beta_0$  = intersep

$\beta_1 - \beta_5$  = parameter yang diestimasi

Estimasi dilakukan dengan 9 skenario masing-masing menggunakan definisi operasional yang berbeda untuk variabel SDM dan SDA. Adapun spesifikasi model dari 9 skenario yang diestimasi tersebut sebagai berikut :

$$\text{Sk\#1 : } D4 = \beta_0 + \beta_1 \text{ INV} + \beta_2 \text{ SDM}_{11}) + \beta_3 \text{ SDA}_{11}) + \beta_4 \text{ AG} + \beta_5 \text{ T} \dots\dots\dots (5.12)$$

$$\text{Sk\#2 : } D4 = \beta_0 + \beta_1 \text{ INV} + \beta_2 \text{ SDM}_{11}) + \beta_3 \text{ SDA}_{21}) + \beta_4 \text{ AG} + \beta_5 \text{ T} \dots\dots\dots (5.13)$$

$$\text{Sk\#3 : } D4 = \beta_0 + \beta_1 \text{ INV} + \beta_2 \text{ SDM}_{11}) + \beta_3 \text{ SDA}_{31}) + \beta_4 \text{ AG} + \beta_5 \text{ T} \dots\dots\dots (5.14)$$

$$\text{Sk\#4 : } D4 = \beta_0 + \beta_1 \text{ INV} + \beta_2 \text{ SDM}_{21}) + \beta_3 \text{ SDA}_{11}) + \beta_4 \text{ AG} + \beta_5 \text{ T} \dots\dots\dots (5.15)$$

$$\text{Sk\#5 : } D4 = \beta_0 + \beta_1 \text{ INV} + \beta_2 \text{ SDM}_{21}) + \beta_3 \text{ SDA}_{21}) + \beta_4 \text{ AG} + \beta_5 \text{ T} \dots\dots\dots (5.16)$$

$$\text{Sk\#6 : } D4 = \beta_0 + \beta_1 \text{ INV} + \beta_2 \text{ SDM}_{21}) + \beta_3 \text{ SDA}_{31}) + \beta_4 \text{ AG} + \beta_5 \text{ T} \dots\dots\dots (5.17)$$

$$\text{Sk\#7 : } D4 = \beta_0 + \beta_1 \text{ INV} + \beta_2 \text{ SDM}_{31}) + \beta_3 \text{ SDA}_{11}) + \beta_4 \text{ AG} + \beta_5 \text{ T} \dots\dots\dots (5.18)$$

$$\text{Sk\#8 : } D4 = \beta_0 + \beta_1 \text{ INV} + \beta_2 \text{ SDM}_{31}) + \beta_3 \text{ SDA}_{21}) + \beta_4 \text{ AG} + \beta_5 \text{ T} \dots\dots\dots (5.19)$$

$$\text{Sk\#9 : } D4 = \beta_0 + \beta_1 \text{ INV} + \beta_2 \text{ SDM}_{31}) + \beta_3 \text{ SDA}_{31}) + \beta_4 \text{ AG} + \beta_5 \text{ T} \dots\dots\dots (5.20)$$

Angka *subscript* pada variabel SDM dan SDA menunjukkan definisi operasional variabel yang bersangkutan sebagai berikut :

SDM = 1) Indeks Mutu Manusia / Human Development Index (HDI) adalah indeks gabungan yang didasarkan pada tingkat harapan hidup, tingkat pendidikan dan standar hidup.

- 2) Indeks SDM sebagaimana dimaksud dalam PP No.104 tahun 2000,  
yaitu hasil perhitungan dari :

Angkatan Kerja Daerah / Populasi Daerah

Jumlah Angkatan kerja Seluruh Daerah /

Jumlah Populasi Seluruh Daerah Tahun 2000

- 3) Angkatan kerja (penduduk usia kerja) yang bekerja tahun 2000

SDA = 1) Indeks SDA sebagaimana dimaksud dalam PP No.104 tahun 2000,  
yaitu hasil perhitungan dari :

PDRB Sektor SDA Daerah / PDRB Daerah

Jumlah PDRB Sektor SDA Seluruh Daerah /

Jumlah PDRB Seluruh Daerah Tahun 2000

- 2) Jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah yang  
bersangkutan tahun 2000.

- 3) Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah ybs tahun 2000

Hasil estimasi dengan menggunakan 9 skenario diringkas dalam Tabel 5.3.

sebagai berikut :

**Tabel 5.6.**  
**Ringkasan Estimasi Posisi Perekonomian**  
**Dengan 9 Skenario**

Skenario D-4	INV	SDM	SDA	AG	Dummy	Keterangan
Sk#1 :						Σ Var.Sig = 1 α 10%
D4 : 1						
Koef Reg	3,633E-05	-0,411	-1,150	19,215	15,864	
Wald	2,272	0,437	0,057	1,122	0,000	
Prob-Sig	0,132	0,509	0,811	0,290	0,998	
D4 : 2						
Koef Reg	-1,59E-05	0,364	-15,277	-42,762	8,564	
Wald	0,244	0,138	1,310	0,377	-	
Prob-Sig	0,621	0,710	0,252	0,539	-	

D4 : 3						
Koef Reg	1,311E-05	0,108	1,845	10,269	-3,993	
Wald	0,627	0,160	1,399	2,689	-	
Prob-Sig	0,428	0,689	0,237	0,101*	-	
Sk#2 :						$\Sigma$ Var.Sig = 1 $\alpha$ 5%
D4 : 1						
Koef Reg	4,886E-05	-0,365	1,501E-07	20,418	15,577	
Wald	1,556	0,265	0,022	1,678	0,000	
Prob-Sig	0,212	0,607	0,882	0,195	0,998	
D4 : 2						
Koef Reg	1,08E-05	0,328	1,25E-07	5,765	-4,823	
Wald	0,234	0,592	0,039	0,509	-	
Prob-Sig	0,629	0,441	0,843	0,476	-	
D4 : 3						
Koef Reg	8,138E-06	0,250	7,795E-07	7,293	-2,945	
Wald	0,204	0,682	4,551	1,474	0,000	
Prob-Sig	0,652	0,409	0,033**	0,225	1,000	
Sk#3 :						$\Sigma$ Var.Sig = 0
D4 : 1						
Koef Reg	6,900E-04	5,049	-2,91E-09	1157,248	-180,182	
Wald	0,005	0,002	0,004	0,005	0,001	
Prob-Sig	0,943	0,962	0,951	0,943	0,975	
D4 : 2						
Koef Reg	2,306E-06	0,287	1,923E-12	6,730	-5,890	
Wald	0,17	0,408	0,012	0,705	-	
Prob-Sig	0,898	0,524	0,914	0,401	-	
D4 : 3						
Koef Reg	2,784E-06	0,253	1,895E-11	7,504	-7,114	
Wald	0,041	0,680	2,259	1,763	0,000	
Prob-Sig	0,839	0,409	0,133	0,184	0,999	
Sk#4 :						$\Sigma$ Var.Sig = 2 $\alpha$ 5%, 5%
D4 : 1						
Koef Reg	4,846E-03	9435,435	-3,23E-05	741,589	-166,008	
Wald	0,004	0,004	0,003	0,004	0,000	
Prob-Sig	0,947	0,947	0,958	0,950	0,962	
D4 : 2						
Koef Reg	5,113E-05	97,420	-1,85E-07	-7,747	6,626	
Wald	2,203	2,408	0,068	0,329	0,000	
Prob-Sig	0,138	0,121	0,794	0,566	0,999	
D4 : 3						
Koef Reg	1,579E-05	-48,346	1,064E-06	4,146	-0,279	
Wald	0,710	4,120	5,092	0,477	-	
Prob-Sig	0,399	0,042**	0,024**	0,490	-	
Sk#5 :						$\Sigma$ Var.Sig = 1 $\alpha$ 10%
D4 : 1						
Koef Reg	1,158E-03	3427,073	6,803	3,177	123,975	
Wald	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Prob-Sig	0,985	0,985	0,988	1,000	0,990	

D4 : 2						
Koef Reg	4,067E-04	2489,795	-217,761	-1029,17	410,059	
Wald	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Prob-Sig	0,994	0,992	0,990	0,991	0,990	
D4 : 3						
Koef Reg	1,318E-05	-29,858	1,643	8,807	-6,154	
Wald	0,715	2,585	0,968	2,176	-	
Prob-Sig	0,398	0,108*	0,325	0,140	-	
Sk#6 :						Σ Var.Sig = 1
D4 : 1						α 10%
Koef Reg	7,143E-04	1299,713	-1,16E-09	465,170	-113,438	
Wald	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Prob-Sig	0,982	0,988	0,985	0,983	0,990	
D4 : 2						
Koef Reg	3,585E-05	83,198	6,345E-12	-4,808	-3,800	
Wald	1,387	1,907	0,096	0,124	-	
Prob-Sig	0,239	0,167	0,757	0,724	-	
D4 : 3						
Koef Reg	1,016E-05	-38,009	1,615E-11	4,754	0,448	
Wald	0,544	2,867	1,919	0,882	0,000	
Prob-Sig	0,461	0,090*	0,166	0,348	1,000	
Sk#7 :						Σ Var.Sig = 2
D4 : 1						α 1%, 5%
Koef Reg	-5,81E-04	9,034E-04	-39,495	-19,019	-6,777	
Wald	0,002	0,001	0,001	0,000	0,000	
Prob-Sig	0,969	0,972	0,975	0,998	0,999	
D4 : 2						
Koef Reg	-5,09E-05	1,452E-04	-150,993	-314,13	32,107	
Wald	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	
Prob-Sig	1,000	0,989	0,981	0,985	1,000	
D4 : 3						
Koef Reg	-5,83E-04	8,353E-04	1,064E-03	-37,277	-20,493	
Wald	0,002	352,026	5,092	0,000	0,000	
Prob-Sig	0,969	0,000***	0,024**	0,995	0,998	
Sk#8 :						Σ Var.Sig = 1
D4 : 1						α 1%
Koef Reg	-1,04E-03	6,559E-04	1,077E-05	144,137	49,930	
Wald	0,001	1494,013	0,000	0,000	0,000	
Prob-Sig	0,970	0,000***	0,986	0,989	0,995	
D4 : 2						
Koef Reg	5,394E-05	-6,75E-06	3,91E-07	15,355	-44,15	
Wald	1,438	0,912	0,315	1,378	-	
Prob-Sig	0,231	0,339	0,575	0,240	-	
D4 : 3						
Koef Reg	-1,05E-03	6,448E-04	1,093E-05	127,501	33,859	
Wald	0,001	-	0,000	0,000	-	
Prob-Sig	0,970	-	0,986	0,990	-	

Sk#9 :						$\Sigma$ Var.Sig = 0
D4 : 1						
Koef Reg	-7,16E-04	9,034E-04	-2,04E-09	948,078	-130,223	
Wald	0,000	0,001	0,001	0,001	0,000	
Prob-Sig	0,988	0,972	0,975	0,974	0,990	
D4 : 2						
Koef Reg	5,307E-05	-7,71E-06	7,84E-12	12,625	3,233	
Wald	1,208	0,923	0,174	1,246	0,000	
Prob-Sig	0,272	0,337	0,676	0,264	-1,000	
D4 : 3						
Koef Reg	-1,05E-03	7,051E-04	-6,03E-11	143,707	-58,070	
Wald	0,001	0,001	0,000	0,000	-	
Prob-Sig	0,981	0,976	0,998	0,991	-	

Keterangan signifikansi : \* =  $\alpha$  10%, \*\* =  $\alpha$  5%, \*\*\* =  $\alpha$  1%

Berdasarkan hasil estimasi beberapa skenario tersebut menunjukkan bahwa skenario 7 mempunyai jumlah variabel signifikan terbanyak dengan tanda sesuai teori, yaitu 2 variabel yang signifikan meliputi variabel SDM signifikan pada alpha 1% (p value 0,000) dan SDA signifikan pada alpha 5% (p value 0,024). Dengan demikian Sk#7 merupakan model terbaik dan menunjukkan bahwa SDM lebih cocok dipakai data angkatan kerja yang bekerja, sedangkan SDA lebih cocok dipakai data indeks SDA sebagaimana dimaksud dalam PP No.104 tahun 2000. Dilihat dari jumlah variabel yang signifikan dan kecocokan tanda maka SK#7 merupakan model terbaik (*best fit*) yang dianalisis lebih lanjut.

Hasil analisis model regresi logistik multinomial Sk#7 menunjukkan bahwa kemampuan prediksi variabel bebas terhadap posisi perekonomian seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 5.7.**  
**Klasifikasi Kemampuan Prediksi Variabel Bebas**  
**Terhadap Posisi Perekonomian**

Observed	Predicted				
	Cepat maju cepat tumbuh	Maju tertekan	Berkembang cepat	Relatif tertinggal	Percent Correct
Cepat maju cepat tumbuh	7	0	1	0	87,5%
Maju tertekan	0	3	0	0	100,0%
Berkembang cepat	1	0	10	0	90,9%
Relatif tertinggal	0	0	0	13	100,0%
Overall Percentage	22,9%	8,6%	31,4%	37,1%	94,3%

Dari Tabel 5.7. tersebut menunjukkan bahwa tingkat sukses total peramalan model regresi logistik multinomial sebesar 94,3%, dengan 87,5% daerah cepat maju cepat tumbuh, 100% daerah maju tertekan, 90,9% daerah berkembang cepat dan 100% daerah relatif tertinggal.

Adapun hasil estimasi model regresi logistik multinomial sebagai berikut :

**Tabel 5.8.**  
**Hasil Estimasi Model Regresi Logistik Multinomial**

Parameter Estimates									
D4		B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% Confidence Interval for Exp(B)	
								Lower Bound	Upper Bound
1.00	Intercept	-385.168	3257.058	.014	1	.906			
	INV	-.581E-04	.015	.002	1	.969	.999	.971	1.029
	SDM	9.034E-04	.025	.001	1	.972	1.001	.952	1.052
	SDA	-.39.495	1266.685	.001	1	.975	7.040E-18	.000	.
	AG	-19.019	6468.320	.000	1	.998	5.498E-09	.000	.
	DUMMY	-6.777	6189.262	.000	1	.999	1.140E-03	.000	.
2.00	Intercept	176.064	16891.511	.000	1	.992			
	INV	-.509E-05	.099	.000	1	1.000	1.000	.824	1.213
	SDM	1.452E-04	.011	.000	1	.989	1.000	.979	1.022
	SDA	-150.993	6506.651	.001	1	.981	2.658E-66	.000	.
	AG	-314.130	17179.609	.000	1	.985	3.758-137	.000	.
	DUMMY	32.107	59386.826	.000	1	1.000	8.8E+13	.000	.
3.00	Intercept	-361.873	3256.916	.012	1	.912			
	INV	-.583E-04	.015	.002	1	.969	.999	.971	1.029
	SDM	8.353E-04	.000	352.026	1	.000	1.001	1.001	1.001
	SDA	1.064E-03	.000	5.092	1	.024	1.000	1.000	1.000 <sup>a</sup>
	AG	-37.277	6468.283	.000	1	.995	6.467E-17	.000	.
	DUMMY	-20.493	8387.775	.000	1	.998	1.259E-09	.000	.

a. Floating point overflow occurred while computing this statistic. Its value is therefore set to system missing.

Hasil analisis Tabel 5.8. tersebut menunjukkan bahwa menurut kriteria statistik Wald, pada posisi 3 (daerah berkembang cepat) menunjukkan variabel SDM signifikan pada alpha 1% ( $p\text{-value} = 0,000$ ) dengan nilai statistik Wald 352,026, koefisien regresi 0,0008353 dan variabel SDA signifikan pada alpha 5% ( $p\text{-value} = 0,024$ ) dengan nilai statistik Wald 5,092, koefisien regresi 0,001064. Hal ini menunjukkan bahwa SDM dan SDA mempunyai pengaruh yang dapat diandalkan untuk meramalkan klasifikasi daerah pada posisi daerah berkembang cepat. Sedangkan variabel INV, AG dan T (dummy) tidak signifikan dengan nilai statistik Wald INV = 0,002 ( $p\text{ value } 0,969$ ), AG = 0,000 ( $p\text{ value } 0,995$ ) dan T (dummy) = 0,000 ( $p\text{ value } 0,998$ ), sehingga tidak dapat diandalkan sebagai variabel peramal. Dengan demikian terdapat 2 faktor penentu terhadap posisi daerah sebagai daerah berkembang cepat yaitu sumber daya manusia dilihat dari jumlah angkatan kerja yang bekerja dan sumber daya alam dilihat dari indeks SDA.

Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa apabila jumlah angkatan kerja yang bekerja naik sebesar 1000 orang maka probabilitas suatu daerah berada pada posisi daerah berkembang cepat naik sebesar 83,53%. Dan jika angka indeks SDA naik sebesar 1 maka probabilitas suatu daerah berada pada posisi berkembang cepat naik sebesar 0,1%.

Klasifikasi daerah cepat maju cepat tumbuh (1) berdasarkan kriteria statistik Wald menunjukkan bahwa seluruh variabel tidak signifikan, sehingga seluruh variabel peramal tidak dapat digunakan untuk meramalkan posisi perekonomian pada klasifikasi daerah cepat maju cepat tumbuh.



Kemudian daerah maju tertekan berdasarkan kriteria statistik Wald menunjukkan bahwa seluruh variabel tidak signifikan. Dengan demikian seluruh variabel peramal tidak memiliki pengaruh dan tidak dapat diandalkan untuk meramalkan posisi daerah maju tertekan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap probabilitas suatu daerah berada pada posisi daerah berkembang cepat. Atau dengan kata lain perkembangan suatu daerah dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Acuan penelitian ini adalah penelitian Hairul Aswandi dan Mudradjat Kuncoro (2002) pada penyusunan model kaitannya dengan posisi perekonomian pada kasus, aplikasi dan variabel yang berbeda, sehingga hasilnya tidak dapat dibandingkan. Dengan demikian dapat dikatakan penelitian ini masih sangat awal dan perlu dikembangkan melalui penelitian-penelitian lebih lanjut.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sesuai tujuan penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di mana setiap kenaikan investasi sebesar Rp 1 juta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0004% dengan asumsi faktor-faktor lain konstan.
2. Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang bekerja sebesar 1000 orang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,005% dengan asumsi faktor-faktor lain tetap.
3. Sumber daya alam berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan kenaikan indeks sebesar 1 satuan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,255%.
4. Secara ekonomis dapat diinterpretasikan bahwa investasi PMDN & PMA, sumber daya manusia (angkatan kerja yang bekerja) dan SDA (indeks SDA) merupakan variabel penentu bagi pertumbuhan ekonomi.
5. Pada posisi 3 (daerah berkembang cepat) menunjukkan bahwa variabel SDM signifikan pada alpha 1% ( $p\text{-value} = 0,000$ ) dan variabel SDA signifikan pada alpha 5% ( $p\text{-value} = 0,024$ ).

6. Sumber daya manusia dan sumber daya alam mempunyai pengaruh yang dapat diandalkan untuk meramalkan klasifikasi daerah pada posisi daerah berkembang cepat.
7. Sumber daya manusia dilihat dari jumlah angkatan kerja yang bekerja dan sumber daya alam dilihat dari indeks SDA merupakan faktor penentu terhadap posisi daerah sebagai daerah berkembang cepat.
8. Apabila jumlah angkatan kerja yang bekerja naik sebesar 1000 orang maka probabilitas suatu daerah berada pada posisi daerah berkembang cepat naik sebesar 83,53%, dan jika angka indeks SDA naik sebesar 1 maka probabilitas suatu daerah berada pada posisi berkembang cepat naik sebesar 0,1%.

## 5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, implikasi kebijakan yang dapat diterapkan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan upaya : menarik investor baik PMDN maupun PMA dengan cara menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi di daerah, program-program pembangunan yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja, pemanfaatan potensi sumber daya alam secara optimal.
2. Dalam upaya peningkatan posisi perekonomian dari daerah relatif tertinggal menjadi daerah berkembang cepat diperlukan pemanfaatan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiono (1995), *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi, BPFE, Yogyakarta.
- Gujarati, Damodar, N., (1995), *Basic Econometric*, Third Edition, McGraw-Hill, Boston.
- Hendra Esmara (1994), Globalisasi Ekonomi dan Pembangunan Daerah, *Prisma* 8, Agustus 1994.
- Hill (1989), *Unity and Diversity Regional Economic Development in Indonesia Since 1970*, Oxford University Press.
- Juliana Juvitaning Sarwati (2001), Pengantar Perencanaan Perekonomian Daerah, *Materi Diklat Teknis Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, tidak dipublikasikan.
- Jawa Tengah Dalam Angka 1996-2000, Kerjasama Bappeda Propinsi Jawa Tengah - Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah.
- Lincoln Arsyad (1999), *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Mudradjat Kuncoro & Hairul Aswandi (2002), Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan : Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993 - 1999, *Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia*, Vol.17 No.1, hal 27-45.
- Mudrajat Kuncoro (1993), *Indonesia Menjelang Tahun 2000 : Sebuah Renungan*, Analisis CSIS, XXII (2), Maret - April
- Neni Pancawati (2000), Pengaruh Rasio Kapital-tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Stok Kapital dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pertumbuhan GDP Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol.15 No.2, FE-UGM, 2000.
- Nurul A Hidayati (2001), Pergeseran Paradigma, Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang, *Plannit Journal*, Edisi Perdana, Mei-Juni, 29-34
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992, tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah*.
- Prasetyo Soepono (1999), Teori Lokasi : Representasi Landasan Mikro Bagi teori Pembangunan Daerah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vo.14 No.4, 4-24.

- Prasetyo Soepono (2000), Model Gravitasi Sebagai Alat Pengukur Hinterland dari Central Place : Suatu Kajian Teoritik, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vo.15 No.4, 414-423.
- Prasetyo Soepono (2001), Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (Ekspor) : Posisi dan Sumbangannya Bagi Perbendaharaan Alat-Alat Analisis Regional, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vo.16 No.1, 45-53.
- Pendapatan Regional Jawa Tengah (1995 – 2000)*, Kerjasama Bappeda Propinsi Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah.
- Pelatihan Praktis Ekonometrika – Aplikasi Econometric Views 3.0*, Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi (LKSE) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.
- Rudy Badrudin (1997), Pengembangan Wilayah Propinsi DIY – Pendekatan Teoritis, ISSN 1410-2641.
- Repelita VI Daerah Propinsi Jawa Tengah 1994/1995 – 1998/1999*, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
- Richardson, Harry W (1991), *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*, Penerjemah : Paul Sitohang, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sjafrizal, (1997), Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Barat, *Prisma* 3, Maret 1997.
- Suahasil Nazara (1994), Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia – Suatu Aplikasi Fungsi Produksi Agregat Indonesia 1985 – 1991, *Prisma* 8, Agustus 1994.
- Suryaningrum (2000), Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia, *Media Ekonomi & Bisnis*, FE-UNDIP, Vol.XII No.1 Juni 2000.
- Singgih Santoso (2001), *Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, PT. Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta.
- Sadono Sukirno (1999), *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi Kedua, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sadono Sukirno (2000), *Makroekonomi Moderen – Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Todaro, Michael P (2000), *Pembangunan Ekonomi*, Penerjemah : Haris Munandar, Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang "*Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 - 2004*".

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang "*Pemerintahan Daerah*"

Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang "*Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*".

Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 1992 tentang "*Penataan Ruang*".

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No104 Tahun 2000 tentang "*Dana Perimbangan*".